

Menyaji Perencanaan Profesional

SIMPUL

Perencanaan

Volume 21 | Tahun 10 | Desember 2013



**KEARIFAN
LOKAL
VS
MODERNISASI**

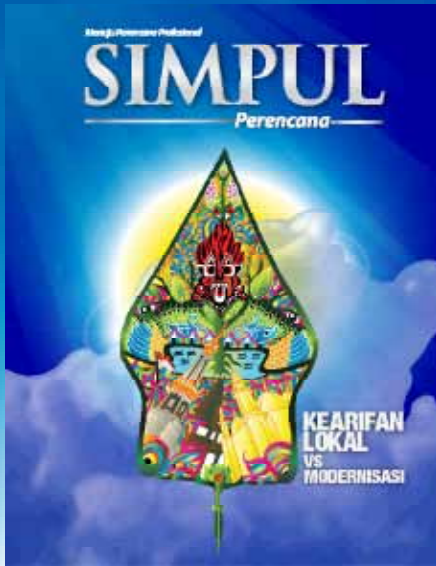
ISSN 1693-4229

E-Mail : simpul@bappenas.go.id



Bung Hatta

Bapak Koperasi Indonesia



SIMPUL PERENCANA

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN BAPPENAS).

PELINDUNG: Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

TIM PELAKSANA

PEMIMPIN UMUM: Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN BAPPENAS)

PEMIMPIN REDAKSI: Wiwit Kuswidiati

DEWAN REDAKSI: Shri Mulyanto, Zamilah Chairani, Meily Djohar, Hari Nasiri Mochtar, Guspika, Edy Purwanto

REDAKTUR PELAKSANA: Wiky Witarni, Maslakah Murni, Rita Miranda, Edy Susanto, Dwi Harini Septaning Tyas, Feita Puspita Murti

DISTRIBUSI/SIRKULASI: Eko Slamet Suratman

ADMINISTRASI/KEUANGAN: Nita Agustin

EDITOR : Setio Utomo dan Tim Simpul

GRAFIS & LAYOUT : Hendra Yudiyanto

TENAGA PENDUKUNG: CH. Nunik Ispriyanti, Sukranto, Jajang Muhari

ALAMAT REDAKSI :

Pusbindiklatren Bappenas

Jl. Proklamasi No.7, Jakarta 10320

Telp .(021) 319 28280, 319 28285, 319 28279

E-Mail: simpul@bappenas.go.id

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan. Tulisan bisa dikirim kapan saja.

Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

Pembaca Simpul yang budiman,

Kita baru saja memasuki awal-awal tahun 2014, tahun dimana menurut presiden sebagai tahun politik, artinya di tahun 2014 ini akan dipenuhi dan diwarnai oleh kegiatan-kegiatan politik yang berskala nasional. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut karena sesuai jadwal dan rencana maka tahun 2014 ini akan ada dua hajatan besar bagi bangsa Indonesia yang sebagian masyarakat menyebutnya sebagai pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang merupakan hajatan politik nasional tersebut adalah pertama, pada 9 April 2014 nanti akan diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan anggota DPD. Sedangkan hajatan politik nasional kedua adalah diadakannya pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019 yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014.

Di samping kita memasuki tahun politik, awal tahun ini kita juga memasuki tahun-tahun bencana yang menyebar di berbagai pelosok tanah air. Banjir di Jakarta yang menjadi langganan setiap tahun, meletusnya gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Banjir Bandang di Kota Manado yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan banjir serta tanah longsor di beberapa kabupaten dan kota di wilayah tanah air.

Tentu dua peristiwa ini membawa dampak bagi laju pembangunan yang sedang berjalan dan yang sedang direncanakan. Bagaimana potret dan keadaan perencanaan pembangunan di Indonesia pasca pemilu 2014 akan sangat berdampak bagi pembangunan nasional. Meskipun telah ada dan disusun RPJP Nasional 2005-2030 dan masing-masing pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki RPJP Daerah, pergantian pimpinan nasional, pergantian kepala daerah dan status suatu daerah sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun perencanaan pembangunan di suatu daerah. Dalam kaitan kebijakan perencanaan pembangunan, khususnya di daerah, maka Simpul ingin mengangkat dan membahas tentang perencanaan pembangunan di daerah yang dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka menghadapi globalisasi dan pasar bebas. Beberapa contoh kebijakan perencanaan pembangunan di daerah seperti di Kabupaten Jembrana, Bali, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan informasi dan potret bagaimana posisi kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan di daerah mereka. Seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana nilai-nilai lokal tersebut dapat mewarnai pembangunan karakter manusianya di masa depan. Di samping itu kita juga dapat perspektif tentang pembangunan kebudayaan, nilai-nilai lokal dan bagaimana sebaiknya hal ini diposisikan dalam pembangunan nasional dari sudut pandang Budayawan, Radar Panca Dahana dan Sosiolog, Prof.Dr. Paulus Wirutomo. Dengan membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh para nara sumber tersebut, kita dapat belajar memahami bagaimana sebaiknya perencanaan pembangunan dilakukan dengan perspektif yang multi sektor atau setidaknya memotret dengan sudut pandang lain dari pelaksanaan pembangunan saat ini dan hasil-hasilnya. **Selamat membaca.**

Cakrawala:



Provinsi Kepulauan Riau merupakan contoh miniatur Indonesia. Keragaman tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi kendala dan hambatan dalam pembangunan berupa konflik sosial yang bersifat horizontal. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil langkah menjadikan budaya melayu, sebagai nilai kearifan lokal **Baca hal...9**

Drs.H. Naharuddin, MTP
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau



Pengembangan kearifn lokal dalam konteks modernitas di DIY, dinas pendidikan membuat mulok tentang pelajaran yang berkaitan dengan dolanan anak yang bersifat tradisional. Esensinya bukan kembali pada permainan tradisional namun pada nilai-nilainya

Baca hal...27

Drs.Tavip Agus Rayanto, MSI
Kepala Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta



Pembangunan budaya itu sering kali dilihat terlalu dipisahkan dari sudut pandang struktural. Analisa sosiologis melihat bahwa antara pembangunan struktural dan kultural itu sangat terpisah. Masing-masing memiliki penganut kultural dan struktural berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak pernah bertemu. Mereka merasa masing-masing merasa penting namun memisahkan diri. Penganut kultural menganggap aspek kultural sangat penting dan sebaliknya **Baca hal...15**

Paulus Wirutomo
Sosiolog, Universitas Indonesia

Wawancara



Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan

Baca hal...37

Drs. I Ketut Swijana, MT
Kepala Bappeda Kab. Jembrana



Sehebat apapun kebudayaan kita dan dengan usia yang panjang itu lama-lama juga akan hancur kalau digempur secara terus menerus dan habis-habisan oleh budaya asing yang hedonis, materialistik, individualis dan konsumerisme **Baca hal...21**

Radhar Panca Dahana
Budayawan

Lainnya:

- hal.
- 3 DARI KAMI
- 5 GERBANG
- 33 FORUM AP2I
- 44 LIPUTAN
- 50 SOSOK ALUMNI
- 54 AKADEMIKA
- 57 OPINI
- 68 SELINGAN



Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal, Antara Karakter, Tradisi dan Inovasi Bangsa

November 2013, merupakan bulan terpenting dalam even internasional bagi Indonesia. Pada bulan tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia diadakan Forum Budaya Dunia yang dilaksanakan di Bali. Kegiatan ini tidak saja penting dalam arti Indonesia sebagai penyelenggara, namun juga Indonesia merupakan penggagas dari kegiatan tersebut. Selama ini memang banyak forum-forum tingkat dunia yang diselenggarakan untuk bidang ekonomi dan sosial. Forum-forum tersebut membicarakan bagaimana sebaiknya pembangunan bidang ekonomi dan sosial dilaksanakan dengan bekerja sama yang saling menguntungkan bagi Negara-negara di dunia. Kesadaran akan pentingnya pembangunan kebudayaan sebagai salah satu penguat dan faktor dalam pembangunan umat manusia menjadi landasan dan alasan bagi terlaksananya kegiatan Forum Kebudayaan Dunia tersebut.



Sebagai Negara penggagas dan pelaksana Forum Kebudayaan tersebut, bagaimana sesungguhnya pembangunan Kebudayaan di dalam negeri sendiri? Apakah kebudayaan (Indonesia) masuk dalam isu strategis dalam pembangunan nasional dan mengarah pada nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat kita? Apakah pembangunan budaya yang membentuk karakter bangsa sudah mengarah pada implementasi nilai-nilai kearifan lokal dan secara nasional menjadi jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika? Banyak kritik dan saran yang disampaikan oleh para ahli, pengamat, intelektual dan budayawan tentang kurangnya perhatian pemerintah dan tidak adanya konsep dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan di Indonesia. Hal ini berdampak negatif pada pembangunan sosial-ekonomi yang melahirkan kesenjangan dan membentuk karakter masyarakat yang konsumernis, hedonis dan individualis. Bahkan ada tuduhan, pemerintah justru menjadi “komprador” dalam hal intervensi budaya asing yang hedonis dan individualis.

Derasnya arus globalisasi, informasi dan perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan nasional dan pembangunan di daerah. Menyadari dampak sisi negatif tersebut saat ini pembangunan budaya dan pembangunan karakter melalui revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sudah mulai banyak dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia.

Secara umum, kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama (**Raja Maspin Winata**).

Bagaimana dengan inovasi dalam pembangunan ?. Inovasi dan kearifan lokal acapkali dipandang saling bertentangan. Inovasi, sebagai cikal bakal atau pemicu awal bergulirnya perubahan sosial, dianggap mewakili sisi masyarakat yang modern, dinamis, serta penuh semangat untuk mencapai kemajuan. Sedangkan kearifan lokal sering dituding terlalu tradisional, statis, dan cenderung mengandung keinginan mempertahankan keadaan tetap sebagaimana adanya. Bagaimana sebaiknya pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara nasional? Dan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal menjadi unsur penting dan harus menjadi bahan dan masukan dalam pembangunan di daerah?. Setiap daerah harus memiliki kreativitas dan inovasi sendiri untuk bisa mengakomodir kepentingan besar ini agar jati diri dan karakter bangsa ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sesuai tuntutan dan perkembangan jaman.

Tradisional tidak harus berarti terbelakang. Budaya tradisional dan nilai-nilai kearifan lokal sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial, dan politik dari masyarakat pada tempat dimana budaya tradisional tersebut melekat.

Budaya tradisional akan senantiasa mengalami perubahan yang dinamis, sehingga sama sekali tidak menghambat inovasi menuju kemajuan.

Kita bisa melihat dua bangsa Asia Timur, yaitu Jepang dan Cina, telah lama menggabungkan kearifan lokal serta tradisi spiritualitasnya yang kaya dengan inovasi dan

kemajuan ilmu pengetahuan modern. Jepang, misalnya, selalu memadukan prinsip-prinsip manajemen modern dengan tradisi Kaizen yang diwarisi dari era Samurai dahulu. Bukan hanya itu, dalam proses modernisasi Jepang, nilai-nilai tradisional seperti 'loyalitas tanpa batas pada Kaisar' akan dengan mudah diubah menjadi 'loyalitas pada perusahaan', sehingga sangat membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi pembajakan ataupun perpindahan tenaga kerja antar perusahaan. Sedangkan di Cina, nyaris semua gedung bertingkat yang ada di kota-kota besar negeri Tirai Bambu itu dirancang berdasarkan prinsip Feng Shui, meski tentunya tanpa mengabaikan kaidah-kaidah arsitektur modern.

Mencermati kegemilangan yang diraih bangsa-bangsa tersebut ketika berhasil mencari titik temu antara kearifan lokal dan inovasi, rasanya terlalu naif bila masih saja mempertentangkan keduanya. Terlebih bila mengingat bahwa bangsa Indonesia lahir atas dasar kesepakatan berbagai nilai, baik yang bersifat sentripetal (pusat) maupun sentrifugal (daerah). Dengan demikian, mengabaikan nilai dan kearifan lokal berarti melawan kodrat sebagai negara bangsa.

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, sesungguhnya tidaklah sulit menemukan berbagai kearifan lokal yang hidup dan menghidupi masyarakat. Kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, petuah, ataupun semboyan kuno yang melekat pada keseharian. Kearifan lokal biasanya tercermin pula dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama ataupun nilai-nilai yang berlaku di kelompok masyarakat bersangkutan. Nilai-nilai tersebut umumnya dijadikan pegangan, bahkan bagian hidup yang tak terpisahkan, hingga dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Kearifan lokal tadi, jika didayagunakan dengan tepat, diyakini akan mampu mendorong inovasi dan perubahan ke arah kemegahan serta kegemilangan seutuhnya.

Nilai-nilai kearifan lokal di Yogyakarta, Bali dan Melayu adalah contoh yang dapat menjadi spirit dalam berinovasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional tanpa kehilangan jati diri bangsa. Semoga.

(Setio Utomo)



Drs. H. Naharuddin, M. TP

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

“Pembangunan Fisik dan Pembangunan Manusia sama pentingnya, jadi tidak ada yang lebih utama.

**KEARIFAN
LOKAL
DI NEGERI
GURINDAM
DUABELAS**

KEPRI MERUPAKAN MINIATUR INDONESIA

Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau pada tahun 2002. Dengan potensi sumber daya alam yang berada di beberapa kabupaten, termasuk potensi Kabupaten Natuna, Kota Batam, Provinsi Kepri ingin memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Dengan kondisi 96% merupakan lautan dan sisanya, 4% berupa daratan yang terdiri lebih dari 2000 pulau Kepri terus merencanakan pembangunan di segala bidang. Bagaimana perencanaan pembangunan di Provinsi Kepri, khususnya keterkaitannya dengan elemen atau unsur-unsur kearifan lokal dilaksanakan di Kepri?, berikut penuturan Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Drs. Naharudin, MTP, kepada Simpul di ruang kerjanya.

Bagaimana bapak melihat sistem perencanaan pembangunan saat ini? Apakah sudah sesuai, cepat, tepat, sesuai kebutuhan, berkelanjutan?

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Apabila kita merujuk kepada definisi tersebut, maka sistem perencanaan pembangunan saat ini pada dasarnya sudah sesuai, cepat, tepat, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini telah menyusun RPJMD periode II, dimana dalam penyusunannya telah dipertimbangkan asas keberlanjutan dari rencana pembangunan jangka panjang di daerah dan keterkaitannya dengan pembangunan dalam skala Nasional. Di dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut, telah diidentifikasi kebutuhan pembangunan yang bertujuan untuk memajukan Provinsi Kepulauan Riau dan mensejahterakan masyarakatnya yang diimplementasikan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan dengan asas kepatuhan terhadap dokumen-dokumen tersebut, agar tujuan yang lebih besar dapat dicapai dan kesejahteraan masyarakat diperoleh. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran pemerintahnya juga turut mengawal kebutuhan pembangunan di Kabupaten/Kota dengan melakukan *Road Show* sebagai tindakan aktif dalam rangka memastikan pembangunan yang sesuai, cepat, tepat, sesuai kebutuhan, berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.”



Drs. Naharudin, MTP
Dokumen perencanaan jangka menengah yang menetapkan visi pembangunan 5 tahun untuk Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau Yang Memiliki Kepribadian Dan Berahlak Mulia. Ini kembali diperkuat dengan menempatkan kearifan lokal

Bagaimana pemahaman para perencana pembangunan terhadap nilai-nilai kearifan lokal?

Kearifan Lokal dalam artian harfiah merupakan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Ini merupakan nilai budaya yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu, tentunya budaya yang baik berupa (1) tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, (2) tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam dan (3) tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, penerapan nilai kearifan lokal akan berdampak pada pembangunan yang berkarakter, efektif, efisien dan bahkan mungkin ekonomis. Karena pembangunan yang dilakukan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat seharusnya dapat mengakomodir pembangunan

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai itu diperlukan para perencana yang paham dan mengerti nilai kearifan lokal, dalam hal ini sumber daya manusia yang merupakan bagian dari masyarakat dan mendalami serta menjalani kearifan lokal itu sendiri yang turut serta sebagai unsur perencanaan pembangunan. Hal ini diharapkan akan dapat membantu pembangunan yang selaras antara perkembangan dan nilai-nilai kearifan lokal. Untuk penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam unsur perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, saya rasa mereka cukup memahami untuk tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan. Karena sebagian besar dari pegawai Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau merupakan putra-putri daerah terbaik yang dianggap mampu mengemban tanggung jawabnya.

Apakah perencanaan pembangunan juga mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam

pembuatan rencana pembangunan baik RPJMD dan rencana pembangunan tahunan ?

Nilai-nilai kearifan lokal menjadi bagian penting dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Nilai-nilai ini selalu menjadi acuan pertama dan utama dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat melalui visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, nilai-nilai kearifan lokal disebutkan dalam visi pembangunan jangka panjang yaitu untuk menciptakan Kepulauan Riau Berbudaya, Maju Dan Sejahtera. Dalam penjabarannya pun nilai-nilai budaya tetap diprioritaskan dengan menempatkannya sebagai misi yang berbunyi “Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau Yang Memiliki Kepribadian dan Berahlak Mulia.” Hal ini diperkuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang menetapkan visi pembangunan 5 tahun untuk “Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau Yang Memiliki Kepribadian Dan Berahlak Mulia.” Ini kembali diperkuat dengan menempatkan kearifan lokal dalam penjabaran visi pembangunan jangka menengah sebagai misi pertama yang berbunyi “Mengembangkan Budaya Melayu Sebagai Payung Bagi Budaya Lainnya Dalam Kehidupan Masyarakat.” Penekanan-penekanan

Dok. draCill

terhadap pentingnya pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal selalu dimunculkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sebagai prioritas pertama dan utama agar pembangunan yang dilaksanakan saling mendukung dengan nilai-nilai kearifan lokal.”

Apakah nilai-nilai kearifan lokal masih relevan sebagai modal perencanaan pembangunan saat ini? Khususnya dalam pembangunan budaya dan karakter bangsa? Sejauh mana relevansinya?

Tentu saja relevan, bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak pernah melupakan warisan sejarahnya. Termasuk didalamnya nilai-nilai kearifan lokal yang terlahir dari perjalanan panjang suatu komunitas masyarakat. Nilai kearifan lokal akan membantu masyarakat untuk mempunyai karakteristik budaya dan identitas bangsa yang kuat yang akan membentengi masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi yang menggerus budaya bangsa serta pada akhirnya menghancurkan generasi-generasi penerus bangsa.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil langkah menjadikan budaya melayu, sebagai nilai kearifan lokal yang telah tumbuh dan berakar kuat di sini, sebagai budaya yang mempersatukan berbagai keragaman”

Apabila nilai kearifan lokal tidak dijaga dengan baik maka akan mempunyai dampak buruk yang sistemik terhadap kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya perkembangan bangsa itu sendiri. Kalau akarnya tidak kuat maka bangsa ini akan terus bergantung dan dikendalikan oleh bangsa lain. Dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, bangsa kita sudah memulai langkah untuk menjadi *Market Leader*, bila saya boleh meminjam istilah ekonomi, dalam persaingan global. Kembali dalam sisi ekonomi, budaya mempunyai nilai jual yang tinggi bagi suatu bangsa.”

Apakah ada “kontradiksi” antara perencanaan pembangunan berbasis kearifan lokal dan pembangunan berbasis kebutuhan pasar?

Kontradiksi ini mungkin saja terjadi, namun pemerintah sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan bertugas untuk mensinergikannya. Nilai kearifan lokal yang berumur puluhan atau bahkan ratusan tahun pasti akan mempunyai sisi yang bersinggungan dengan pembangunan berbasis kebutuhan pasar. Akan tetapi bila kedua hal ini bisa disejalkan, maka akan tercipta sebuah perpaduan yang luar biasa. Kita bisa ambil contoh Jepang yang membuka diri kepada dunia barat, yang mengalami masa krisis pada tahun 1854 dikarenakan sistem kapitalisme dunia barat yang dianggap merusak nilai-nilai kearifan lokal mereka. Namun setelah proses akulturasi antara nilai kearifan lokal Jepang dan sistem kapitalisme dunia barat terciptalah kombinasi yang menjadikan Jepang sebagaimana yang kita kenal sekarang ini, negara yang kental nilai budayanya namun tetap tanggap menghadapi perubahan dunia sebagai negara industri modern. Hal-hal tersebut merupakan proses pembelajaran yang akan mengungkapkan kemampuan suatu bangsa yang sesungguhnya.

Bagaimana dengan karakter manusia Indonesia saat ini? Apakah ini juga berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin ditinggalkan?

Dalam pandangan saya, manusia Indonesia saat ini sesungguhnya memiliki karakter yang beragam, dalam artian ada yang baik dan ada juga yang kurang baik. Yang kurang baik karakternya mungkin dikarenakan mulai meninggalkan nilai kearifan lokal yang baik. Mungkin tidak ditinggalkan sepenuhnya namun sudah tidak tertanam sekuat dulu. Contoh karakter yang kurang baik manusia Indonesia saat ini adalah cenderung hedonis, konsumtif, *self centered*, tidak peduli dengan sekitar, turunnya moralitas, hilangnya nilai-nilai agama. Ini mungkin disebabkan oleh runtuhnya pertahanan nilai-nilai kearifan lokal terhadap agresi pengaruh budaya asing "

Apakah pemerintah daerah memiliki strategi pembangunan daerah atau roadmap bagaimana pembangunan Indonesia mengadopsi modal pembangunan dengan kearifan lokal?

Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah mengadopsi nilai kearifan lokal dalam

perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan perhatian dan komitmen dalam mengimplementasikan nilai kearifan lokal sebagai modal pembangunan. Secara tertulis strategi pembangunan daerah atau *Roadmap* sebagaimana arti harfiahnya belum dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau telah mengakomodir diterapkannya nilai kearifan lokal sebagai modal



INILAH GURINDAM DUA BELAS

KARYA BAJA ALI HAJI

**PERSIMPANAN YANG INDAH - INDAH
YAITULAH ILMU YANG MEMBERI FAEDAH
AND HENDAH BERTUTUR
ANAN GURINDAM YANG BERATUR**

GURINDAM FASAL YANG PERTAMA

**BARANGSIAPA TIADA MEMEGANG ADAMA
SEKALI - KALI TIADA BOLEH DIBILANGKAN NAMA
BARANGSIAPA MENGENAL YANG EMPAT
MAHA IA ITULAH ORANG YANG MA'RIFAT
BARANGSIAPA MENGENAL ALLAH
SURUH DAN TEGAHNYA TIADA IA MENYALAH
BARANGSIAPA MENGENAL DIRI
MAHA TELAH MENGENAL ARAN TUHAN YANG BAHRI
BARANGSIAPA MENGENAL DUNIA
TAHULAH IA BARANG YANG TERPERDAYA
BARANGSIAPA MENGENAL ANNIHAT
TAHULAH IA DUNIA HUDHARAT**

GURINDAM FASAL YANG KEDUA

**BARANGSIAPA MENGENAL YANG TERBESUT
TAHULAH IA MAHA TANUT
BARANGSIAPA MENINGGALKAN SEBARANG
SEPERTI RUMAH TIADA BERTIANG
BARANGSIAPA MENINGGALKAN PUSA
TIDAKLAH MENEMPAT DUA TERMAHA
BARANGSIAPA MENINGGALKAN ZAKAT
TIADALAH HARTANYA BEROLEH BERTAH
BARANGSIAPA MENINGGALKAN HAJI
TIADALAH IA MENEMPLINAKAN JANJI**

pembangunan dengan menempatkannya pada prioritas pertama dan utama dalam pembangunan. Secara tidak langsung, hal ini juga merupakan bentuk *Roadmap* dalam pembangunan yang bermodalkan kearifan lokal.”



Dok. draCill

GURINDAM DUABELAS

Karya Raja Ali Haji
di Pulau Penyegat.
Merupakan awal
sejarah lahirnya Bahasa
Indonesia

Apakah kearifan lokal perlu “direvitalisasi”? Bagaimana caranya?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi mempunyai makna proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Bila merujuk pada definisi tersebut maka dalam pandangan saya nilai kearifan lokal perlu direvitalisasi dalam arti menyesuaikan dengan konteks perkembangan jaman. Karena bila nilai kearifan lokal yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan jaman tetap dipertahankan, maka akan menghambat perkembangan bangsa itu sendiri. Namun, jika nilai kearifan lokal tidak diakomodir dalam pembangunan maka bangsa kita akan kehilangan jati dirinya”

Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan budaya dan karakter? Bagaimana mengatasinya?

Dapat saya sampaikan, bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan contoh miniatur Indonesia dimana hampir semua suku, budaya dan adat istiadat ada disini. Keragaman tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi kendala dan hambatan dalam pembangunan berupa konflik sosial yang bersifat horizontal. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil langkah menjadikan budaya melayu, sebagai nilai kearifan lokal yang telah tumbuh dan berakar kuat di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai budaya yang mempersatukan berbagai keragaman yang ada tersebut.”

Apakah pembangunan manusia saat ini sudah sesuai mana yang lebih diutamakan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia?

Dalam pandangan saya pembangunan manusia sama pentingnya dengan pembangunan fisik, sehingga tidak bisa salah satunya lebih diutamakan. Keduanya harus berjalan sejalan dan seiring, agar menghasilkan pembangunan yang maksimal. Kalau kita perhatikan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sepertinya lebih banyak pembangunan fisik daripada pembangunan manusia. Hal tersebut sesungguhnya merupakan sebagian upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia yang memerlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung. Inilah yang dikatakan sebagai pembangunan yang sejalan dan seiring, karena keduanya sebetulnya saling mengisi. Jika melihat kepada pencapaian maka hasil pembangunan fisik lebih kasat mata karena lebih mudah diukur, tidak seperti pembangunan manusia yang dampaknya baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama. Namun sebenarnya capaian pembangunan manusia merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan fisik.”

[SIMPUL]



“Perencanaan pembangunan itu harus memiliki paradigma dan integrasional, sehingga tidak terjebak pada strukturalis atau kulturalis. Pembangunan struktur, kultur dan dinamika relasi harus sejajar dan berjalan secara berkelindan “

Hasil Pembangunan di Indonesia saat secara fisik dapat dilihat kemajuannya dengan tersedianya berbagai infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya telah tersedia di berbagai daerah Indonesia. Begitu juga sektor dan kontribusi dari pihak swasta. Namun demikian masih banyak kesenjangan antar masyarakat dan perilaku yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Bagaimana sebaiknya pembangunan itu direncanakan dan dilaksanakan? Dari perspektif sosiologis, Profesor Paulus Wirutomo, Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia, memberikan pandangannya tentang pembangunan di Indonesia.

Menurut bapak, bagaimana pembangunan budaya dalam lingkup pembangunan nasional?

Pembangunan budaya itu seringkali dilihat terlalu dipisahkan dari sudut pandang struktural. Analisa sosiologis melihat bahwa antara pembangunan struktural dan kultural itu sangat terpisah. Masing-masing memiliki penganut kultural dan struktural berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak pernah bertemu. Mereka merasa masing-masing merasa penting namun memisahkan diri. Penganut kultural menganggap aspek kultural sangat penting dan sebaliknya. Sebetulnya walaupun kita akan memperhatikan kultur, juga tidak tepat kalau kita hanya memperhatikan kultur namun terpisah dari struktur.

INTISARI KEARIFAN LOKAL KITA ITU ADA, YAITU PANCASILA

Bagaimana sebaiknya ?

Kami di departemen sosiologi sedang berusaha melakukan analisis secara holistik dan sistemik, dimana kita ingin bahwa analisis kekuatan kultural dan kekuatan struktural itu harus bertemu. Inipun masih kurang, karena kita harus mengikuti dan menempatkan dinamika relasi, interaksi atau proses di dalamnya secara seimbang. Apa yang disebut kekuatan struktural itu adalah segala kekuatan yang berasal dari luar diri individu manusia yang menekan dan dipaksakan kedalam diri manusia. Contohnya adalah: peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Itu kekuatan struktural, ada juga kekuatan struktural lain yang keluar dari luar pemerintah yaitu kekuatan struktural yang berasal dari swasta. Contohnya : adanya *mall*, *gadget*, bank swasta yang menekan dan memaksa kita mengikuti aturan tersebut. Kekuatan struktur lain seperti kekuatan struktur jumlah penduduk yang banyak sangat mempengaruhi sifat dan perilaku penduduk. Yang lain adalah alam yang membuat kita berubah secara perilaku, seperti cuaca yang berubah, infrastruktur. Misalnya di Jakarta, apabila tidak segera di bangun *Massive Rapid Transportastion* (MRT) maka budaya di Jakarta akan ambruk dan hancur karena tekanan lalu-lintas dimana kita akan berebut di jalan dengan pengguna lainnya dan ini akan kacau balau. Kita akan mengembangkan budaya yang tidak baik ditengah kemacetan yang luar biasa. Tekanan ini akan berubah bila MRT berhasil dan akan merubah perilaku kita. Pembangunan MRT secara sosiologis juga merupakan “revolusi Budaya”, karena budaya



Dok. @draCill

REVOLUSI BUDAYA
Pembangunan MRT
secara sosiologis juga
merupakan revolusi
budaya

Jakarta akan hancur dengan kemacetan Jakarta. Jadi MRT tidak hanya revolusi infrastruktur tapi juga Revolusi Budaya. Kalau ingin menjelaskan perilaku orang Indonesia, lihat saja kekuatan struktural dari infrastruktur yang ada yang mempengaruhi perilaku dan membentuk budayanya. Maka wajar dan pantas apabila orang Indonesia berperilaku seperti saat ini karena kekuatan struktur menekan dan membuatnya seperti itu.

Bagaimana dengan kekuatan struktur perencanaan ?

Para perencana dimana-mana, apalagi di Bappenas itu pemegang dan memiliki kekuatan struktural yang luar

biasa karena akan mempengaruhi perilaku masyarakat luas. Jadi mengapa manusia Indonesia menjadi sedemikian rupa, banyak faktor yang mempengaruhi khususnya dari kekuatan struktural yang menekan. Untuk perbaikan semua ini maka tidak cukup kekuatan struktural namun juga harus ada kekuatan kultural. Analisis kita menunjukkan bahwa kekuatan kultural juga memiliki kekuatan yang besar dalam perilaku dan budaya kita. Namun kekuatan kultural itu berasal dari dalam diri kita dan masuknya sejak kita dilahirkan, contohnya kultur jawa, kultur batak dan lainnya. Jadi manusia atau individu itu dari luar di tekan oleh kekuatan struktural dan dari dalam ditekan oleh kekuatan kultural. Dua kekuatan ini sama-sama memiliki kekuatan luar biasa untuk menekan individu. Agama, keyakinan, adat dan lainnya itu kekuatan kultural. Dua kekuatan ini saling menekan dan mempengaruhi perilaku individu. Setiap langkah perencanaan selalu saling mempengaruhi antara kekuatan kultural dan kekuatan struktural. Jadi manusia sebenarnya juga tidak seperti robot yang ditekan dari luar oleh kekuatan struktur dan ditekan dari dalam oleh kekuatan kultur, namun masih ada 1

lagi ranah yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu dinamika interaksi atau dinamika proses relasi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut terjadilah negoisasi terhadap sesuatu kekuatan struktur atau kekuatan kultur. Ketiga aspek tersebut yaitu kekuatan struktural, kekuatan kultural dan dinamika interaksi antar individu itu saling berpotongan dan mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki pembangunan manusia itu maka kita harus memperbaiki pembangunan sosial budayanya. Kehidupan sosial budaya itu merupakan kesatuan dari kekuatan struktural, kultural dan dinamika interaksi prosesnya. Pembangunan sosial itu adalah pembangunan yang inputnya dana, infrastruktur dan lainnya, namun tidak menghasilkan dana berikutnya, sedangkan pembangunan ekonomi adalah sebaliknya. Pembangunan sosial budaya adalah dimana kita mengalami peningkatan kehidupan sosial budaya. Misalnya budaya kita lebih baik, struktur lebih baik, proses lebih baik. Dengan pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial budaya maka struktur, kultur dan dinamika relasi atau proses interaksi manusia akan baik maka otomatis ekonomi akan baik. Kita tidak boleh membangun secara sektoral karena tidak akan merubah secara struktural, misalnya pembangunan pendidikan yang hanya sektoral dan tidak membangun strukturnya maka meskipun infrastruktur meningkat, kesejahteraan guru meningkat namun secara struktur keadaan masyarakat tetap tidak berubah.

Bagaiman sebaiknya ?

Maka pembangunan sosial budaya itu harus baik dan yang lainnya akan membaik. Misalnya pembangunan ekonomi meskipun sudah maju namun secara struktur ekonomi kita tidak memberi kemajuan pada masyarakat karena struktur ekonominya menguntungkan para pemilik modal dan kapitalis. Bagaimana kultur dalam ekonomi?, kultur ekonomi kita ada yang gotong-royong dan kultur yang tidak gotong-royong. Kehidupan dan pembangunan ekonomi sangat tergantung pada struktur dan kulturalnya. Contoh lain adalah, para petani kita yang tidak bisa bersaing dengan petani negara lain, hasil-hasil pertanian di dominasi impor, ini juga di sebabkan pembangunan struktur pertanian kita yang membuat petani tertekan dan tidak berkembang. Pembangunan struktural harus memberikan kekuatan kepada kelompok-kelompok kecil agar bisa bernegosiasi dengan kelompok-kelompok besar. Maka semua sektor itu harus di bangun struktur, kultur dan proses dinamika interaksinya. Dengan demikian kita kembali pada pembangunan Indonesia yaitu membangun sosial budayanya. Dimana ekonominya?, ya ekonomi itu ada di dalam pembangunan sosial

“Kultur ekonomi kita ada yang gotong royong dan kultur yang tidak gotong royong. Kehidupan dan pembangunan ekonomi sangat tergantung pada struktur dan kulturalnya.”

budaya tersebut. Pembangunan sosial budaya itu menciptakan kehidupan yang lebih baik, negoisasi dengan baik, struktur relasi baik, dan kultur jadi baik. Kehidupan sosial budaya itu mencakup semua kehidupan dan merupakan akar dari semua kehidupan. Pembangunan sosial budaya itu harus berpegang pada nilai-nilai atau *values based development*.

Apa yang dimaksud yang *values based development* ?

Values based development Itu adalah pembangunan yang inklusif artinya pembangunan dimana hak-hak dan kewajiban itu untuk semua dan tidak untuk sebuah kelompok atau eksklusif. *Ultimate goal* dari pembangunan sosial budaya itu adalah *social inclusiveness*. Kalau pembangunan ekonomi itu tujuan akhirnya adalah pertumbuhan maka pembangunan sosial budaya itu sosial inklusi. Contohnya yang baik saat ini adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan kesempatan semua warga negara memiliki hak yang sama dalam bidang kesehatan meskipun tentu tidak sama dalam perlakuan. Begitu juga dengan bidang pendidikan yang menjadikan wajib belajar itu juga merupakan tujuan sosial inklusi.

Apa landasannya perencanaan pembangunan *values based development* ini ?

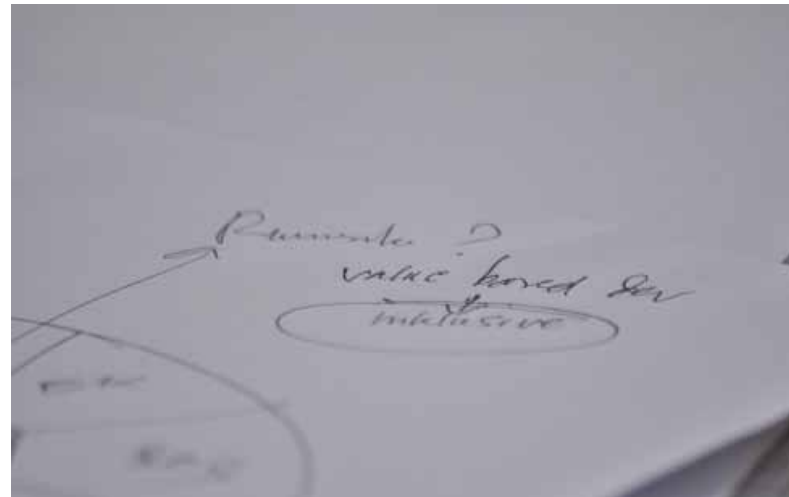
Sebetulnya kita sudah punya nilai-nilai dasar dalam pembangunan, yaitu Pancasila dan gotong royong. Kalau kita ingin menciptakan kehidupan Indonesia secara sosial budaya baik ya wujudkan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi semua sektor pembangunan itu juga harus

mengarah pada akar sosial budaya Pancasila. Jadi pembangunan Indonesia itu pendekatannya adalah pembangunan masyarakatnya. Kondisi saat ini merupakan kondisi dimana pembangunan struktur yang tidak seimbang berpengaruh pada kultur sehingga terjadilah oligarki, parlemen berkuasa namun tidak pro rakyat, sehingga secara struktur masyarakat tertekan dan tidak bisa berbuat banyak. Akibatnya proses relasi dan dinamika interaksi terganggu dan akhirnya strukturnya tidak baik dan menciptakan kultur yang kurang baik juga.

Bagaimana dengan potensi budaya-budaya lokal dan bagaimana strategi pembangunannya ?

Budaya lokal itu juga dipengaruhi oleh pusat. Kita harus benar-benar mengecek input sebelum membuat perencanaan pembangunan. Kita lihat paradigma rencana pembangunan kita, sebelum berbicara secara manajerial. Karena itu lebih penting. Kita lihat pembangunan selama ini, dulu di masa Presiden Soeharto, pembangunan yang secara ekonomi pertumbuhannya cukup baik selama 30 tahun lebih, namun paradigmanya tidak pas karena secara struktur masyarakat tertekan. Dulu semua terpusat pada

presiden dengan Inpresnya, akibatnya masyarakat tidak bisa bergerak bebas dan tidak bisa mengembangkan kemampuannya dan saat ini masyarakat terlihat belum bisa mengembangkan kemampuannya sampai di tingkat desa akibat kuatnya tekana struktur dan mempengaruhi kultur masyarakat dalam membangun. Perencana pembangunan harus mengecek tujuan-tujuan



pembangunan, dan paradigma pembangunan kita. Misalnya saat ini terlihat bagaimana “tanah” sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dan diperjualbelikan, padahal “tanah” merupakan hajat hidup orang banyak semestinya tidak bisa diperjual belikan. Demikian juga dengan bidang kesehatan. Ini terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Maka semua pembangunan



Dok.
@draCIII

PAULUS WIRUTOMO

Sisi positif otonomi dan pilkada langsung melahirkan individu-individu yang berprestasi

harus berdampak secara struktural dan membuat kultur dan proses menjadi baik. Artinya pembangunan harus menciptakan *power relation* yang seimbang. Contoh yang baik adalah Pembangunan di Solo itu menciptakan pembangunan secara struktural dan berdampak baik pada *power relation* dan juga menciptakan kultur yang baik. Dan itu memungkinkan bila beberapa daerah memiliki kepemimpinan seperti itu. Beberapa kepala daerah itu sudah memiliki *values based* dalam memimpin dan membangun daerahnya dan semua sektor mengikuti mereka. Bandung dan Surabaya merupakan contoh saat ini. Dengan struktur seperti itu maka proses interaksi berubah menjadi lebih baik, karena proses interaksi lebih baik ini akan menciptakan kultur atau perilaku yang baik pula.

Bagaimana dengan sistim otonomi saat ini apa ada peluang untuk menjadi lebih baik?

Otonomi daerah merupakan kesempatan baik bagi Indonesia untuk menciptakan struktur, kultur dan dinamika relasi yang baik dan menciptakan keadaan yang lebih baik. Artinya kalau ada pemimpin yang kuat dan memiliki paradigma maka akan tercipta struktur, proses dan kultur yang baik. Ini sisi positif otonomi dan pilkada langsung melahirkan individu-individu yang berprestasi. Ibarat kita ingin menciptakan Negara seperti “Singapura”, maka saat ini ada kesempatan lebih besar karena Indonesia sudah ada lebih dari 500 “Singapura”. Jadi pembangunan manusia itu harus menyeimbangkan antara struktur, proses dan kultur dimana itu harus berjalan secara berkelindan. Jadi kearifan lokal sebagai kultur harus di fasilitasi oleh struktur yang mendukung. Kalau kearifan lokal di tekan dan di “injak-injak” oleh kekuatan struktural maka lama-lama juga akan habis dan mati. Solo adalah contoh pembangunan yang baik dalam pembangunan kultur yang didasari oleh kekuatan struktur. Maka 3 unsur itu tidak ada yang mendominasi, ketiga unsur tersebut yaitu struktur, proses dan kultur itu harus seimbang. Ketiga unsur itu harus seimbang dan berjalan berkelindan agar mencapai tujuan pembangunan. Jadi tidak ada yang dominan dan paling penting. Secara teoritis ketiga-tiganya sejajar, meski jarang kekuatan kultur dapat merubah struktur dan lebih banyak struktur yang merubah kultur. Maka harus ada pemahaman tentang hal ini agar dapat merubah pemikiran, khususnya para perencana pembangunan dan para pembuat kebijakan. Perspektif ini disebut perspektif integrasional dan tentu ini tidak sama dengan perspektif strukturalis atau kultural.

[SIMPUL]



“Harus ditanamkan bahwa manusia Indonesia itu sangat homososius. Kita harus melawan ajaran yang hedonistik, konsumeris dan individualistik, itu sangat tidak Indonesia”.

**KEARIFAN
LOKAL
DALAM
PERSPEKTIF
BUDAYA**

PERKUAT BASIS KEBUDAYAAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Di akhir tahun 2013, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah dan menggelar pertemuan Forum Kebudayaan Internasional di Bali.

Apakah hal ini menandakan kebudayaan menjadi isu strategis dalam pembangunan dunia sebagaimana pembangunan bidang lainnya. Bagaimana dengan kebudayaan Indonesia masa lalu dan Kebudayaan Indonesia saat ini? Adakah pengaruh budaya-budaya asing terhadap kebudayaan dan perilaku masyarakat Indonesia. Berikut penuturan dan pandangan Radar Panca Dahana, Budayawan, kepada Simpul tentang kebudayaan Indonesia dan problematiknya.

Menurut Bapak bagaimana bentuk kebudayaan Indonesia secara sederhana dan bagaimana kita memahami kebudayaan tersebut?

Menurut saya, kebudayaan itu memang abstrak dan tidak berbentuk konkrit, jadi kebudayaan itu sesuatu yang ada di dalam ruang idea kita. Ruang dimana kita meneguhkan atau menyepakati apa yang kita sebut norma, nilai-nilai, etos, etik dan lainnya. Itu semua abstrak, jadi kalau kita mau melihat bentuk kebudayaan melalui bentuk gelas, mobil, subak, Candi Borobudur, batik itu bukan kebudayaan dan kita akan salah. itu semua merupakan produk kebudayaan atau produk dari alam abstrak yang melahirkan satu karya grafis berupa material, berupa tarian, karya sastra, bangunan dan lainnya. Jadi kita tidak bisa melihat kebudayaan

bangsa Indonesia saat ini dengan melihat Subak, Borobudur, itu keliru karena itu produk kebudayaan Indonesia ribuan tahun lalu. Jadi Borobudur itu produk kebudayaan masa lalu dan kebudayaan itu terus berubah karena dunia abstrak itu terus berubah. Kebudayaan yang melahirkan Borobudur, Piramid itu produk kebudayaan jaman itu. Kalau bangunan, monumen atau artefak memang tidak berubah dan seperti itu. Jadi Borobudur, Piramid itu artefak atau bangunan lainnya itu merupakan hasil produk kebudayaan jaman itu. Kebudayaan yang melahirkan Borobudur dan Piramid berbeda dengan kebudayaan kita jaman ini. Jadi kita harus melihat kebudayaan yang melahirkan artefak atau bangunan tersebut pada jamanya.

Berarti kebudayaan itu berubah menurut waktu, bagaimana kebudayaan saat ini ?

Kebudayaan kita saat ini, ya bagaimana dengan artefak kita saat ini yang mencerminkan kebudayaan kita saat ini. Artefak jaman ini adalah kemacetan yang luar biasa, bangunan yang tidak ramah lingkungan dan tata kota yang tidak karuan. Kita lihat kebudayaan Mesir dan Irak saat ini, itu sangat berbeda dengan Kebudayaan Mesir dan Irak ratusan tahun lalu. Jadi dunia abstrak itu setiap saat berubah. Jadi jangan melihat kebudayaan saat ini dengan melihat artefak masa lalu.



RADAR PANCA DAHANA

Artefak jaman ini adalah kemacetan yang luar biasa, bangunan yang tidak ramah lingkungan dan tata kota yang tidak karuan

Jadi apa definisi kebudayaan secara sederhana dan bagaimana fase perubahannya?

Kebudayaan itu sederhananya adalah semacam konsensus atau upaya manusia dengan menggunakan kapasitas mental intelektual, fisik dan spiritual untuk bisa menjaga survivalitasnya dari subspeciesnya yang bernama manusia. Itu fase pertama kebudayaan manusia. Jadi manusia bisa *survive* di bandingkan

dengan mahluk lainnya, Tahap kedua, dengan menggunakan akalny, maka kebudayaan manusia itu untuk meninggikan dan memuliakan harkat dan martabat manusia di antara mahluk lainnya. Produk kebudayaan ini ditandai dengan munculnya agama, ideologi dan ilmu pengetahuan di masa awal. Dimana semua ini intinya adalah antroposentrisme atau semua berpusat pada manusia. Ini melahirkan kesadaran, pemahaman dan keyakinan baik secara *scientific* maupun religius, bahwa manusia merupakan khalifah atau pemimpin di muka bumi dan semua berpusat dan mengacu pada manusia. Fase ke dua ini menjadi landasan fase ke tiga dari kebudayaan dimana manusia dalam posisi yang dominan dan merasa mempunyai hak untuk mengeksploitasi alam sekelilingnya untuk kesejahteraan dia. Ini awal eksploitasi alam dan lingkungan

atas nama kedigdayaan manusia di atas makhluk lainnya, ini juga di dukung atas nama religius dimana kita diciptakan di atas makhluk lainnya. Ini awal mulanya industrialisasi dan mekanisasi di eropa. Eksploitasi, *Human Right* dan lainnya muncul. Sampai pada tahap ke-4, yaitu dimana teknologi dan informasi berkembang sangat cepat dan dunia mengalami krisis lingkungan yang luar biasa, kerakusan yang muncul pada fase-3, berkembang menjadi kerakusan untuk merampas dan merampok milik orang lain. Eropa mulai menjajah Asia, Afrika dengan semua cara yang canggih. Negara-negara yang masih kaya SDA-nya dijadikan negara yang melayani negara-negara yang barat.

Bagaimana kesadaran kita soal intervensi budaya luar dalam kehidupan kita sehari-hari?

Kita tidak sadar karena alam pikir kita secara teratur meyakini cara berpikir yang mereka “tanamkan” secara terus menerus baik secara kasar maupun halus. Kita sudah dikuasai secara mental, spiritual dan fisikal selama hampir 100 tahun terakhir. Artinya proses pembudayaan kita

sudah tidak berlangsung sebagaimana dahulu proses kebudayaan itu berlangsung di Nusantara. Karena kita berpikir cara berbudaya dan beradab yang dipenetrasi lewat globalisasi itu. Jadi sudah ada semacam keterlanjutan yang tidak bisa di tolak. 99% orang menyetujui dan menerima hal ini. Mungkin semua orang akan bertanya, “apa salahnya sih kalau ada *mall*, *square* dan kemajuan tersebut. Kita bisa “ngopi” disitu. Ini terjadi dan tidak bisa ditolak karena penetrasi adab *continental* dan adab *western* itu luar biasa dan terjadi di seluruh dunia. Ini mau tidak mau sudah meninggalkan kebudayaan yang kita pelihara selama ribuan tahun. Meskipun saat ini masih ada serpihan-serpihan kebudayaan dari Bugis,

Dok. @draCill

“Sehebat apapun kebudayaan kita dan dengan usia yang panjang itu lama-lama juga akan hancur kalau digempur secara terus menerus dan habis-habisan oleh budaya asing yang hedonis, materialistik, individualis dan konsumerisme”

Jawa, Sunda, Tengger yang eksis, namun apabila setiap hari di gempur oleh rangsangan baru berupa konsumerisme, hedonistik, materialistik dan individualisme maka lama-lama daya tahan budaya-budaya lokal tersebut juga akan rontok dan hancur lebur.

Kenapa demikian dan apa akibatnya?

Karena pemerintah yang memiliki obligasi secara historis dan konstitusional yang seharusnya memberikan kekuatan dan melengkapi daya tahan tradisi ini tidak melakukan tugasnya. Pemerintah justru menjadi “komprador” dari kekuatan kekuatan tersebut. Sehebat apapun kebudayaan kita dan dengan usia yang panjang itu lama-lama juga akan hancur kalau digempur secara terus menerus dan habis-habisan oleh budaya asing yang hedonis, materialistik, individualis dan konsumerisme. Contoh serangan itu adalah adanya siaran TV 24 jam yang menayangkan iklan-iklan dan suguhan nilai-nilai konsumerisme, hedon, individual dan kemudian saat kita keluar rumah, tata ruang kita isinya berupa iklan-iklan tersebut dan begitu juga ketika kita baca Koran, juga isinya sama. Dan kemudian kita menganggap inilah kehidupan saat ini, namun pada saat yang sama kita tidak sadar bahwa semua itu *by design*. Kalau sebuah Negara merencanakan masa depannya, bagaimana dia harus berjalan dan bertarung dengan suatu peralatan yang tidak lain adalah “komprador” peralatan tersebut. Akibatnya kita hanya akan jadi budak bagi kekuatan kapital dan global dunia. Kekuatan

ini sudah menguasai arsenal-arsenal kehidupan tradisional bangsa kita, yaitu melalui penjualan senjata dalam militer, diplomasi politik, *scientific* akademik, dan kekuatan kebudayaan. Contoh penetrasi kebudayaan yang masif dilakukan melalui *Hollywood* untuk penetrasi nilai-nilai materialistik dan hedonistik. Jadi bangsa kita harus mengenali dimana sebenarnya nilai-nilai luhur yang selama ribuan tahun mengikat dan memelihara bangsa kita dan berhadapan dengan nilai-nilai baru tersebut. Dimana nilai tersebut di anggap memiliki nilai “demokratis”, nilai “HAM”, nilai pasar bebas, nilai kapitalistik. Nilai-nilai ini dahulu sangat di tolak oleh pendiri bangsa kita karena sangat individualistik. Namun saat ini nilai-nilai ini sekarang berlaku di Indonesia yang di dukung oleh aktor-aktor dalam negeri. Kita menjadi bangsa dan Negara yang rapuh secara budaya.

Apa sebabnya hal ini terjadi?

Sebelum kita merdeka kesadaran kita masih kuat, kita lihat polemik kebudayaan, sumpah pemuda, masih menyadari tentang esensial kebudayaan dan dinamikanya. Begitu merdeka, tokoh-tokoh utama negeri ini didik oleh intelijen asing dan mereka beranak pinak sampai saat ini dan menjadi pejabat-pejabat negara ini yang sudah menginternalisasi nilai-nilai asing perubahan itu dari dalam. Sehingga apa yang datang dari luar pasti di anggap “cocok” karena di dalam sudah ada internalisasi nilai tersebut. Dan semakin berbahaya kalau ini sudah diajarkan sejak PAUD dan kita tidak sadar. Misalnya nilai penjajahan dalam nilai ekonomi saat ini dari dalam diri kita adalah kita merasa tidak “maju dan moderen” apabila tidak ganti *gadget* setahun 2 x. Kenapa, karena setiap hari iklan

sedemikian deras menekan dan mempengaruhi alam idea kita. Ini membuat manusia Indonesia seolah-olah selalu dalam kondisi kritis dalam hal keuangan karena kebutuhan untuk mengkonsumsi apa yang mereka produk. Kemudian kita menganggap ini *lifestyle*. Padahal bukan, ini disebut perampokan atas nilai-nilai jiwa kita. Nah, bagaimana bangsa ini dibangun dan ditetapkan masa depan dan visinya kalau melandaskan diri pada realitas yang involutif dan busuk seperti ini. Inilah kerja-kerja kebudayaan. Ukuran kemajuan sebuah bangsa tidak cukup hanya dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap uang asing, besarnya PDB per kapita dan ukuran ekonomi lainnya, karena semua itu tidak menyelesaikan persoalan dan biasanya itu permainan yang bersifat image dan pencitraan. Ini yang terjadi saat ini, pencitraan soal nilai-nilai ini.



Bagaimana sebaiknya ke depan ?

Kita harus memperkuat basis kebudayaan bila ingin membuat perencanaan pembangunan disegala bidang. Basis kebudayaan itu bukan artefak-artefak masa lalu. Jadi kita tidak hanya cukup memelihara dan mengembangkan Borobudur, Batik dan bangunan lainnya, karena hanya akan menjadi komoditi ringan dan tidak ada nilainya. Kita tidak bisa bertempur disitu. Pemerintah harus mengurus kebudayaan secara intrinsik. Kita harus kembalikan bagaimana pemahaman kultural kita untuk perencanaan-perencanaan kita. Ada banyak yang harus dikembalikan dan ini urusan substansial, kita harus mengembalikan *mindset* kita, perasaan kita, mental kita dan mengembalikan budaya kita yang sebelumnya bukan mental hedonistik, konsumeris dan individualis.



Dok. @draCill

PENDIDIKAN

Jangan jadi alat kepentingan kapital dan global, pendidikan harus menjadi penyeimbang atau alternatif tandingan dari kehendak yang telah di internalisasi sejak jaman kolonialis

Ini memang pekerjaan berat. Kita harus bisa membangun dan bisa menciptakan kondisi dimana proses dinamika kebudayaan itu berlangsung dalam berbagai elemen masyarakat. Misalnya membangun pusat-pusat ekpresi, baik ekpresi sosial, artistik dan lainnya, membangun jaringan informasi yang benar dan jujur, jernih dan bebas kontaminasi apapun. Kita harus membangun ini dan membutuhkan waktu yang lama, tapi ini akan menjadi *“legacy”* pada bangsa dan dunia.

Bagaimana peran pendidikan dalam hal ini ?

Pendidikan jangan jadi alat kepentingan kapital dan global, pendidikan harus menjadi penyeimbang atau alternatif tandingan dari kehendak yang telah di internalisasi sejak jaman kolonialis. Caranya pendidikan harus menanamkan kebudayaan yang abstrak tadi melalui keikutsertaan anak didik melalui *“ritus-ritus”* proses budaya. Jadi anak-anak tidak hanya menjadi konsumen tapi harus mengalami proses sebuah kebudayaan tersebut karena disana ada proses internalisasi nilai-nilai, baik melalui kegiatan agama, kegiatan sosial, kegiatan budaya dan lainnya. Kita jangan mau diasingkan seperti model di luar. Contohnya, saat ini terjadi seni mengalienasi publik dan pada gilirannya publik mengalienasi seni. Ini tidak menjadikan pencerahan bersama antara penonton dan pelaku. Maka hampir wajar, apabila seni saat ini jauh dari realitas masyarakat. Kita harus kembali pada nilai-nilai Indonesia dan nilai itu adalah dimana manusia Indonesia itu diukur oleh sejauh mana manusia Indonesia itu memberi manfaat bagi lingkungannya dan manusia Indonesia itu tidak konsumeris, tidak materialistik dan tidak individualistik. Harus ditanamkan bahwa manusia Indonesia itu sangat *homosocius*. Kita harus melawan ajaran yang hedonistik, konsumeris dan individualistik, itu sangat tidak Indonesia.

Apa bisa ini diimplementasikan dalam kebijakan ?

Bisa, caranya dalah para pengambil kebijakan harus menyadari ini dan secara bahu-membahu untuk mengkondisikan elit lain untuk memiliki kesadaran yang sama dan bertindak bersama sesuai kebijakan yang dikandung dalam kebudayaan kita. Ini tidak mudah karena akan ada kendala dari elit lain yang akan menghalangi karena mengganggu kenyamanan mereka. Apabila ada 10% dari seluruh pejabat dan pembuat kebijakan, saya yakin ini akan menjadi baik.

[SIMPUL]



Drs. Taviq Agus Rayanto, M.Si
Kepala Bappeda Provinsi DIY

“Pola koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi menjadi lebih kuat karena kabupaten/kota merasa ada “ketergantungan” dengan provinsi. Ini adalah kearifan lokal yang diikuti dengan adanya tingkat “kepatuhan” yang tinggi pada provinsi karena Sultan yang otomatis jadi Gubernur”

Yogyakarta mendapatkan daerah ke istimewa melalui undang-undang No. 13, Tahun 2012. Dengan undang-undang keistimewaan tersebut maka Yogyakarta akan dapat membangun daerahnya sesuai dengan keistimewaannya dalam 5 bidang yaitu tentang penetapan kepala kepada daerah, tata ruang, pertanahan, kebudayaan dan pengisian jabatan pemerintahan di DIY. Namun demikian secara nasional pembangunan di DIY tetap mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagai acuan. Kepada Simpul Kepala Bappeda Provinsi Istimewa Yogyakarta, Drs. Tavip Agus Rayanto, MSi menjelaskan bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan di Yogyakarta dalam rangka mengantisipasi perkembangan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Apakah ada unsur-unsur kearifan lokal di adopsi dalam penyusunan perencanaan tersebut dan sejauhmana keistimewaan ini memberi warna.

Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal mewarnai penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Yogyakarta dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan?

Dari tangkapan kami perencanaan pembangunan yang ada di DIY saat ini memang ada kaitanya dengan sistim ke tatanegaraan. Dalam arti secara *lex generalis* kita mengikuti UU Pemerintahan

UU. KEISTIMEWAAN MENJADI PINTU MASUK KAMI UNTUK MENATA SESUAI DENGAN KEARIFAN LOKAL

Daerah No. 32 dan Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dimana semua sudah teratur dan terencana mulai pusat, provinsi dan kabupaten/kota semua saling memiliki keterikatan. Namun demikian, sekarang di kabupaten dan kotamadya itu karena memang bukan kepanjangan tangan pusat maka lebih kental di warnai unsur “politik” melalui mekanisme 5 tahunan itu. Sehingga kadang-kadang perencanaan yang sudah matang di level provinsi tidak sepenuhnya berjalan di kabupaten/kota. Yang kedua adalah sifatnya kadang tergantung pada masa jabatan pimpinan daerah sehingga menjadi tidak mudah untuk di ukur sesuai dengan kebijakan yang dibuat masing-masing masa kepemimpinan. Sehingga Perencanaan pembangunan akan lebih baik apabila dikaitkan dengan UU Pemda. Karena di level provinsi, satu kaki kita itu wakil pemerintah pusat satu kaki merupakan otonomi daerah. Kami juga berperan ganda sebagai wakil pusat, misalnya kami juga harus mewakili pusat dengan meneliti apakah kebijakan di level kabupaten/kota itu sudah sesuai dengan kebijakan pusat, misalnya soal Perda-Perda dan aturan lainnya. Kedua kami juga mempunyai tugas manajerial untuk sinkronisasi dan koordinasi dengan pemda Kab/kota. Dalam konteks penguatan manajerial ini maka semua sudah diatur dalam UU No.25 tahun 2004 tentang SPPN. Tetapi dalam interaksi antara provinsi dan kabupaten/kota terkadang kesannya putus dan tidak ada hubungannya. Kadang-kadang DPRD masih memperdebatkan kedudukan antara Perda





TAVIP AGUS RAYANTO

DIY, karena kebetulan Rajanya jadi gubernur maka ini menjadi momentum bagi kearifan lokal untuk memberi penguatan dalam birokrasi.

Kabupaten/kota dengan Pergub padahal fungsinya berbeda, pergub itu dalam kapasitas provinsi sebagai wakil pusat sedangkan Perda itu lebih pada hal yang berkaitan dengan otonomi. Jadi memang perencanaan pembangunan di level provinsi sudah berjalan namun ada beberapa aturan yang mesti disesuaikan dan disempurnakan dalam kaitanya dengan kabupaten/kota.

Bagaimana dengan Pemahaman Perencana Pembangunan terhadap nilai-nilai kearifan lokal?

Saya melihat kearifan lokal itu bukan sesuatu yang tradisional namun lebih pada inisiatif yang didasarkan pada nilai-nilai lokal yang berkembang disitu. Khusus DIY, karena kebetulan “rajanya” jadi gubernur dan tidak pemilihan maka ini menjadi momentum bagi kearifan lokal untuk memberi penguatan dalam birokrasi. Contohnya adalah pengisian pejabat di kabupaten/kota, kalau di provinsi DIY untuk *fit and proper test* para pejabatnya ada di provinsi. Sehingga dampaknya tidak berhenti pada *fit and proper test* saja, tapi juga pada pola koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi menjadi lebih kuat karena kabupaten/kota merasa ada “ketergantungan” dengan provinsi. Ini adalah kearifan

lokal yang diikuti dengan adanya tingkat “kepatuhan” yang tinggi pada provinsi karena Sultan yang otomatis jadi Gubernur tersebut. Ini yang juga digunakan untuk membenahi perencanaan pembangunan. Kami sudah 2 tahun ini menjadi juara 2 dalam sisi perencanaan pembangunan secara nasional yang diberikan oleh Bappenas. Ada inovasi-inovasi yang kami lakukan seperti merancang perencanaan sampai pengendalian sebagai sebuah siklus yang dimulai dengan penyediaan data base, mekanisme perencanaan dalam bentuk *software seperti Jogja Plan*. Sekian tahun lalu kalau ingin tahu *time series* tentang program yang lalu pad SKPD kita sangat kesulitan dan harus menelitinya secara manual, namun sekarang bisa di akses melalui *web dan software*. Kearifan lokal kita maknai sebagai momentum untuk memperkuat inovasi dan memberikan kekuatan dalam perencanaan. Jadi kearifan lokal bukan berarti tradisional dan seperti jaman kerajaan yang dipersepsikan dan dikesankan tradisional. Termasuk dalam pola-pola pengendalian SKPD, kami memiliki nilai tertinggi di Indonesia dalam penilaian yang dilakukan oleh Setwapres. Kami mengganti ukuran-ukuran SKPD dari

Dok. @draCill
output menjadi *outcome*. Sebagai contoh Bappeda yang memiliki *core* bisnis perencanaan dan pengendalian. Kalau indikatornya *output* saja maka selesai perencanaan dan dihasilkan dokumen, selesai pula pekerjaannya. Tapi kami tidak cukup sampai disitu, kami cek kesesuaian dokumen dengan pelaksanaan di SKPD. Contoh lain adalah bidang pertanian, kami juga cek sampai sejauh mana nilai tukar petani berkembang. Disini juga otomatis melibatkan level kabupaten dan kota. Intinya kami ingin meningkatkan “*grade*”. Kami juga merubah tunjangan kinerja TPP dari *based* organisasi menjadi *based* individu dan ini dipayungi Pergub. Jadi nilai-nilai gubernur yang menjadi “roh” dalam penataan dan perbaikan dan inilah yang kami maknai sebagai kearifan lokal.

“Pengembangan kearifan lokal dalam konteks modernitas di DIY, dinas pendidikan membuat mulok tentang pelajaran yang berkaitan dengan dolanan anak yang bersifat tradisional. Esensinya bukan kembali pada permainan tradisional namun pada nilai-nilainya.”

Bagaimana unsur-unsur itu bisa terakomodasi dalam perencanaan pembangunan ?

Undang-undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta maka membuat kita dalam merencanakan perencanaan pembangunan yang disampaikan oleh gubernur melalui Visi misi yogyakarta dengan judul, “Yogyakarta menyongsong Peradaban Baru”. Itu maksudnya adalah : kita ini jalan, jika regular saja maka tingkat deviasinya bisa tinggi dan kita sudah punya RPJMP-RPJPD. Setelah kami evaluasi deviasinya sangat tinggi. Sebagai kota pendidikan, pariwisata dan budaya, kita ingin mengakselerasi dan menata pembangunan dengan momentum keistimewaan ini. Isinya ada pada buku visi-misi gubernur yang tertuang dalam RPJMD menjelaskan mau kemana dan diapakan sektor-sektor tersebut.

Apakah nilai-nilai kearifan lokal itu masih relevan dalam pembangunan karakter SDM, Budaya dan lainnya ?

Kami lihat bahwa banyak hal yang harus disesuaikan dengan konteks kekinian. Contohnya adalah pengembangan kearifan lokal dalam konteks modernitas di DIY, dinas pendidikan membuat

muatan lokal tentang pelajaran yang berkaitan dengan dolanan anak yang bersifat tradisional. Esensinya bukan kembali pada permainan tradisional namun pada nilai-nilainya. Disitu ada ajaran berbagi peran, kerja sama, dan toleransi seperti dalam permainan petak umpet dan main tali. Kenapa demikian, karena dalam permainan sekarang anak-anak banyak bermain yang sifatnya individualis karena bermain *game* sendiri. Inilah nilai-nilai yang ingin dikembalikan. Jadi bukan permainannya tapi pada nilai-nilainya. Konteks seperti ini yang ingin kami kembangkan. Contoh lain adalah kami membeli bus untuk mewajibkan anak-anak sekolah untuk mengunjungi 38 museum yang ada di DIY dan anak-anak akan menulis tentang apa yang dilihat dan ditemui di museum tersebut. Contoh lain di Dispora, ada pelajaran wajib membuat di sekolah yang akan menjadi seragam batik di masing-masing sekolah. Jadi ada lomba disain batik dan lainnya.

Apakah ada kontradiksi antara nilai-nilai kearifan lokal sebagai unsur dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan pasar ?

Kami melihat *local wisdom* bukan dalam arti tradisional, namun nilai-nilainya maka menurut kami tidak ada kontradiksi dengan perkembangan dan kebutuhan jaman. Kecuali kalau itu nilai-nilai dan cara tradisional. Sebagai contoh adalah pola komunikasi dulu antara SKPD dan gubernur itu ada ewuh pakewuh bahkan ada yang takut namun sekarang saya bisa komunikasi dengan gubernur melalui SMS. Artinya ada perkembangan yang baik dan memaknai kearifan lokal kekinian jadi tidak ada masalah bagi kami.

Bagaimana dampak globalisasi bagi nilai-nilai kearifan lokal khususnya dalam pembangunan karakter yang berbasis kearifan lokal ?

Ada, *jalmo Manungso kang Utomo*, itu artinya pentingnya pembangunan manusia yang utama. *People center development* ini ada dalam pembangunan budaya dan peradaban. Jadi pembangunan SDM di yoga akan menjadi penentu DIY ke depan, sehingga ini relevan dengan kebutuhan pembangunan dan menghadapi tantangan globalisasi. Contohnya adalah deklarasi DIY sebagai kota Pusaka Budaya. Ini sifatnya ada yang fisik dan non fisik. Disini nanti ada nilai-nilai kearifan lokal, khususnya jawa, *hamemayu hayuning buwono*, atau serasi, selaras dan seimbang. Dalam konteks actual pertumbuhan penduduk sekarang 1 %, lahan



pertanian semakin menyempit, kendaraan semakin banyak padahal infrastruktur tetap. Kita sudah memikirkan ini bagaimana ke depan. Termasuk moratorium pembangunan hotel-hotel di kota. Saat ini antri ijin pendirian hotel sangat banyak dan terus bertambah padahal itu hotel berbintang dan itu semua pemiliknya dari luar sementara hotel melati yang milik warga asli akan tergerus. Itu sisi ekonomi yang terkena dampak globalisasi. Dari sisi lingkungan, ketersediaan air tanah semakin kecil karena pembangunan hotel berbintang dan rumah-rumah pemukiman sekitar bisa kekeringan. Ini adalah tantangan bagi PNS untuk berkarakter dan kami akan tingkatkan kemampuan para PNS melalui pengembangan kemampuan lewat pelatihan. Kami ingin DIY menjadi contoh daerah otonomi dan istimewa yang menjalankan ketatanegaraan yang baik bukan sebaliknya. Termasuk kami akan mengatasi kemiskinan yang

masih banyak meskipun tingkat harapan hidup kami tinggi, indeks *happiness* tinggi tapi kontradiksi dengan adanya tingkat kemiskinan yang tinggi.

Bagaimana dengan karakter sebagian masyarakat saat ini yang bersifat materialis, konsumernis dan individualis apakah itu karena meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal ?

Kami sangat prihatin melihat dunia nasional kita yang lebih berorientasi pada *output*. Sebagai contoh dalam dunia pendidikan, anak-anak terlalu banyak pelajaran, jam pelajaran sampai sore dan masih ada tambahan pelajaran, tapi hanya untuk mengejar nilai tertentu dan untuk mendapatkan sekolah yang baik, sehingga anak-anak jadi pragmatis dan seperti robot. Inilah yang ingin kami tata dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu harus juga mengedepankan pengajaran dan tidak hanya fokus pada mata pelajaran tertentu. Kami melihat pendidikan Indonesia sudah cenderung seperti mesin dan mekanistik dan lupa nilai-nilai pengajarannya. Ini juga menjadi agenda dan strategi daerah.

Apakah pemda DIY memiliki strategi dan roadmap dalam pembangunan Indonesia dalam pembangunan Indonesia dengan nilai kearifan lokal ?

Ada dan itu kami tuangkan dalam dokumen yang lengkap beserta strateginya (beliau memberikan *road map* visi misi DIY menyongsong peradaban baru).

Apakah nilai – nilai kearifan lokal masih relevan dan perlu direvitalisasi ?

Harus direvitalisasi dalam konteks ke kinian, misalnya dalam dolanan anak, yang penting itu bukan dolanan anaknya tapi rekaysanya. Kami juga sudah mulai mengaktifkan lomba-lomba cerdas cermat, kelompencapir, lomba budaya, lomba bahasa jawa. Jadi kita rekayasa semua dalam modifikasi dalam konteks kekinian.

Apa kendala dan hambatan dalam melaksanakan semua ini dan bagaimana mengatasinya ?

Kalau kendala dan hambatan itu ada dan banyak, salah satunya adalah komitmen dan konsistensi. Contoh, gubernur sudah mengeluarkan edaran tentang konsumsi lokal untuk rapat-rapat tapi karena alasan SPJ dan alasan teknis lainnya, maka tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan makanan lokal pada saat



LOCAL WISDOM

Kami melihat kearifan lokal bukan dalam arti tradisional, namun nilai-nilainya maka menurut kami tidak ada kontradiksi dengan perkembangan dan kebutuhan jaman.

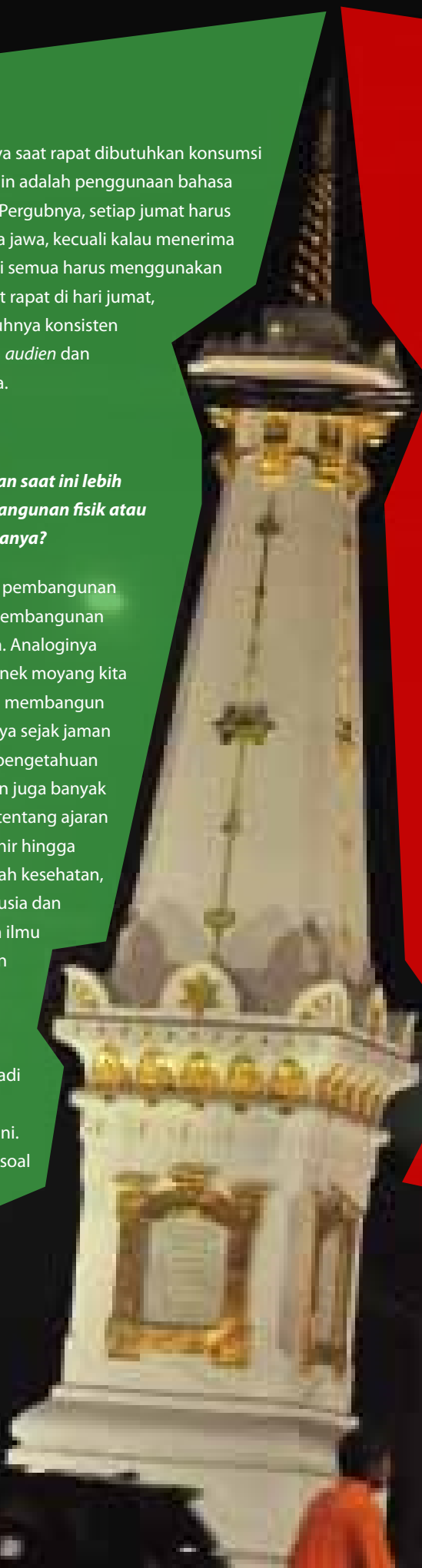
rapat, dimana biasanya saat rapat dibutuhkan konsumsi yang cepat. Contoh lain adalah penggunaan bahasa jawa yang sudah ada Pergubnya, setiap jumat harus menggunakan bahasa jawa, kecuali kalau menerima tamu dari luar DIY jadi semua harus menggunakan bahasa jawa pada saat rapat di hari jumat, namun belum sepenuhnya konsisten karena pertimbangan *audien* dan pertimbangan lainnya.

Apakah pembangunan saat ini lebih condong pada pembangunan fisik atau sumber daya manusianya?

Strategi perencanaan pembangunan DIY lebih bertumpu pembangunan sumber daya manusia. Analoginya adalah bagaimana nenek moyang kita ribuan tahun lalu bisa membangun Borobudur yang artinya sejak jaman dulu sudah memiliki pengetahuan yang tinggi. Di keraton juga banyak kitab-kitab dan serat tentang ajaran bagi manusia sejak lahir hingga mati. Termasuk masalah kesehatan, hubungan antar manusia dan lainnya. Maka dengan ilmu – ilmu lokal disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan sekarang akan dapat di kembangkan menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan konteks saat ini. Jadi sekali lagi bukan soal

tradisionalnya namun nilai-nilainya yang di revitalisasi dalam konteks kekinian dan kami ajarkan kepada semua pihak termasuk anak didik untuk pengembangan SDM DIY. Kami juga mengembangkan nilai-nilai dalam konteks kekinian dalam bidang pendidikan termasuk pembangunan akademi komunitas untuk para pegiat kesenian dan kebudayaan. Jadi lokalitas akan memperkuat nilai-nilai birokrasi kita. Dalam perencanaan pembangunan di DIY kami juga mengundang para ahli yang sesuai dengan bidangnya, sebagai contoh dalam instansi Bappeda kami siapkan tenaga ahli di setiap bidang sesuai dengan bidangnya yang berasal dari perguruan tinggi. Kami juga menyiapkan SDM dengan sistem magang bagi adik-adik yang baru lulus kuliah dan mereka akan langsung bekerja magang di lapangan. Sehingga akan terjadi *link and match* antara perencanaan di meja dan pelaksanaan di lapangan dan adik-adik akan mengecek di lapangan. Kami juga mengadakan Diklat kebudayaan supaya para perencana dan SKPD tidak berpikir sektoral dan kami juga ingin merubah *mind set* para SKPD. Untuk infrastruktur di DIY sebelum Perda disetujui, kami kesulitan dalam penataan baik ruang, tanah dan pembangunan infrastruktur karena semua juga sama seperti provinsi lainnya jadi itu keputusan ada pada kabupaten/kota. Sekarang ini ada 5 pilar ke istimewa yang akan mengikat semua kabupaten/kota dan akan menjadi *heritage city*. Kami juga akan membatasi tingginya bangunan, menata transportasi, infrastruktur dan sarana public lainnya. Ke depan kami akan menjadi lebih baik dan kami atur dalam Peraturan Daerah Istimewa PERDAIS, dan ini akan mengikat semua provinsi kalau dulu tidak bisa karena dulu ada pada wewenang kabupaten/kota. Saat ini kami optimalkan SDM yang ada di provinsi dan kabupaten dan kami tingkatkan kemampuannya.

[SIMPUL]





SEMINAR REGIONAL JFP

Masukan Pemikiran JFP untuk Rancangan Teknokratik RPJMN Nasional 2015 - 2019

dengan tema :
"PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA"

Denpasar, 05 - 06 Desember 2013

Dok. Jajang Muhari

Seminar Regional JFP

Dihadiri oleh Sekretaris
Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas

Dari Seminar Regional JFP

Sumbangsih Pemikiran JFP sebagai masukan untuk penyusunan RPJMN 2015-2019

Pada 5-6 Desember 2013 di Denpasar, Bali telah dilaksanakan Seminar Regional yang diikuti para pejabat fungsional perencana (JFP) dari berbagai unsur dan instansi. Seminar ini merupakan inisiatif dan saran bagi para perencana untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019. RPJMN ini akan menjadi *guidance* bagi pemerintahan baru hasil pemilu 2014 dalam menyusun pembangunan menengah nasional periode 2015-2019.

Seminar regional JFP ini menjadi sarana yang penting dan strategis dilatar belakangi oleh pentingnya mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMN 2015-2019 ini bersifat teknokratik yaitu perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Dengan dasar itulah maka para Pejabat Fungsional Perencana (PFP) memandang perlu dan "wajib" untuk ikut berkontribusi dalam memberikan kontribusi dan masukan pemikiran dalam penyusunan RPJMN ini. Acara yang digelar selama 2 hari ini diikuti sekitar 120 peserta, mereka mendiskusikan dan membahas 6 isu bidang pokok dan strategis dalam pembangunan nasional ke depan yaitu Pembangunan Manusia, Pengembangan Inovasi, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, Pembangunan Wilayah dan Daerah serta Tata Kelola dan Kelembagaan. Para ahli yang kompeten dalam bidang ini diundang



Dok. Jajang Muhari

**Sekretaris
Kementerian PPN/
Sekretaris Utama
Bappenas**

Dr. Slamet Seno Adji, MA
memberi sambutan pada
Seminar Regional JFP
di Bali

dan hadir sebagai pembahas masing-masing sesuai bidangnya. Mereka adalah bidang (1) Pembangunan Manusia: Dr. Bustang, MSi dan Dr. Muksin (Univ. Jember), (2) Pengembangan Inovasi : Ir. Tommy Hermawan, MA dan Dr. Ir. Ugay Sugarmansyah, MS (BPPT), (3) Pembangunan Ekonomi: Dr. Herry Suhermanto dan Dr. Nuri Effendi (UNPAD), (4) Pembangunan Lingkungan: Penny Lukito PhD dan Dr. Sunardi (UNPAD), (5) Pembangunan Wilayah dan Daerah : Dr. Tatag Wiranto, MURP dan bidang (6) Tata Kelola dan Kelembagaan : Dr. Guspika, MBA Dan Prof. Dr. Kumorotomo (UGM)

Banyak isu yang muncul dan menjadi bahan diskusi dalam seminar ini, seperti dalam bidang teknologi dimana dirasakan masih belum

berkembangnya budaya inovasi, lemahnya perhatian pemerintah, rendahnya penghargaan terhadap investor dan disintensif pajak. Sedangkan isu-isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi adalah tantangan ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional dengan fokus pada kesenjangan, modal sosial dan budaya, pasar tenaga kerja, desentralisasi dan kewirausahaan. Isu-isu yang terkait dengan pembangunan tata kelola kelembagaan diantaranya adalah masih tumpang tindih antara fungsi K/L dan daerah, inefisiensi kelembagaan negara khususnya kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran. Sedangkan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia beberapa isu pokok dan strategis yang

mesti diselesaikan antara lain: belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan dasar, belum maksimalnya menggali kearifan lokal, Sisdiknas belum ditunjang daya saing, rendahnya mutu kesehatan, belum menjadikan nilai-nilai agama, budaya sebagai dasar etika utk mendorong daya saing. Dari isu bidang SDM ini diharapkan dalam RPJMN 2015-2019 akan tercapai umur dan harapan hidup lebih panjang, terdidik, hidup layak, kebebasan berpolitik, pemenuhan kebutuhan dasar, terhormat. Sedangkan kebijakan pembangunan dan implementasinya ditargetkan dengan realisasi penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kurang gizi, fertilitas, penyakit TB, malaria, HIV AIDS, serta pembiayaan kesehatan yang memadai. Bidang lingkungan perkotaan membahas dampak iklim, ketersediaan alam pelaksanaan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 27/2012 tentang ijin lingkungan, antisipasi dampak Pemanasan Global,

dan kebiasaan perilaku *Reduce, Reuse, Recycle*. Beberapa sumber masalah dalam bidang ini adalah : Urbanisasi, daya dukung Energi dan lingkungan, ketergantungan BBM impor, kerusakan lingkungan dan kurangnya inovasi proses produksi dan *waste reused*, Ancaman deforestasi, dan kerusakan hutan. Hasil diskusi merekomendasikan hal yang harus dilakukan antara lain perlunya *good governance* dalam pengelolaan lingkungan, Pengelolaan populasi dan urbanisasi, Antisipasi dampak pemanasan global, Pengembangan SDA kelautan dan kemaritiman yang berkelanjutan.

Untuk bidang pembangunan wilayah perlunya penguatan peran Negara, proses pengelolaan politik, pemerintahan negara yang demokratis. Dalam bidang ini juga dibutuhkan pengelolaan ekonomi makro dan peran pasar, pengelolaan ekonomi mikro dan wilayah daratan dan kelautan yang berdaulat. Hal ini penting mengingat permasalahan dalam bidang ini yang masih terjadi saat ini yaitu adanya kesenjangan antar wilayah, arus urbanisasi yang tinggi, pengaruh perilaku pemerintah dan kelembagaanya dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Isu strategis dalam bidang pengembangan wilayah adalah belum meratanya penyediaan investasi, infrastruktur, kelembagaan, belum meratanya pelayanan dasar dan infrastruktur. Diharapkan dalam RPJMN 2015-2019 ada pemerataan pertumbuhan ekonomi dan daya saing antar wilayah dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah.

Hasil diskusi dan pembahasan dalam seminar ini menjadi rekomendasi dan masukan bagi Bappenas dalam penyusunan RPJMN 2015-2019. Inilah sumbangsin nyata pemikiran para JFP dalam menyongsong pembangunan 5 tahun ke depan.



Wawancara



Ir. I Ketut Swijana, MT

Kepala Bappeda Kab. Jembrana

PEMBANGUNAN HARUS MEMPERHATIKAN 3 UNSUR KESEIMBANGAN DAN KEHARMONISAN

“Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, pengetahuan serta strategi kehidupan yang berwujud dalam aktifitas masyarakat dalam menjalani seluruh kehidupan dan menghadapi tantangan kehidupan dalam suatu masyarakat. Baik kehidupan yang berhubungan dengan ekonomi, budaya, sosial, keagamaan dan lainnya”. Bagaimana kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia menghadapi perubahan, arus globalisasi, informasi dan komunikasi tanpa batas. Khususnya di daerah. Berikut pandangan Kepala Bappeda Bali, Ir. I Ketut Swijana, MT, kepada Simpul, sebagai salah satu potret kearifan lokal masyarakat Bali, khususnya dalam mewarnai kebijakan perencanaan pembangunan yang berdampak pada masyarakat.

Bagaimana Bapak melihat sistem perencanaan pembangunan saat ini? apakah sudah sesuai kebutuhan dan berkelanjutan?

Sistem perencanaan pembangunan saat ini cukup unik dibandingkan pada masa sentralisasi. Ketika itu perencanaan didominasi oleh pusat. Perencanaan berstruktur seragam mulai dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Di daerah disusun Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dalam propeda hanya disusun program belanja pembangunan saja sedangkan belanja perkantoran merupakan belanja rutin yang dianggap tidak strategis. Pada Sistem perencanaan pembangunan saat ini, walaupun di pusat ada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN/20 Tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN/5 Tahun), Rencana Kerja Pemerintah (RKP/1 Tahun) dan di daerah juga ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD/20 Tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/5 Tahun), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD/1 Tahun), namun konten dokumen perencanaan daerah sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal dan potensi daerah. Sistem perencanaan pembangunan saat ini

“Kearifan lokal perlu “direvitalisasi” karena disamping banyak terdapat kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan perlu dipertahankan, ada juga Kearifan lokal yang tidak sesuai dengan jamannya”

memang sesuai dengan kebutuhan era reformasi, namun masih belum tepat kalau disebut berkelanjutan karena konten dokumen daerah sangat tergantung dari penguasa ketika dokumen itu disusun.

Bagaimana dengan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jembrana, apakah nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi unsur dan masukan di dalam penyusunannya?

Untuk Visi Pembangunan di Kabupaten Jembrana adalah terwujudnya Jembrana yang *Jagadhita* berlandaskan *Tri Hita Karana* yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal. Upaya perwujudan rencana pembangunan tersebut diharmoniskan, diintegrasikan dan dituangkan dalam matra ruang rencana pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana. RTRWK Jembrana diharapkan mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*.

‘*Tri Hita Karana*’ adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya, yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; *mokhsartam jagatdhita ya ca iti dharma*, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan



kehidupan dengan melaksanakan ke-6 (enam) komponen *sad kertih* yang merupakan enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

Maksudnya nilai-nilai tersebut ?

Atma Kertih adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, prahyangan atau Pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarananya.

Wana Kertih adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun Pura *alas angker* di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara niskala (spiritual).

Danu Kertih adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.

Segara Kertih adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.

Jana Kertih adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan

“ *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan”

I Ketut Swijana

Ruang wilayah di Bali seluruhnya merupakan total palemahan Desa Pakraman dari wilayah Provinsi Bali.

Dok. draCill

kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan keajegan pembangunan Bali.

Jagat Kertih adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan Desa Pakraman yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan *Ida Hyang Widhi* dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut *Cakra Yadnya*. Dalam Bhagawagitha disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan swadharma-nya masing-masing.

Bagaimana dengan pemahaman para perencananya tentang kearifan lokal dalam penyusunan perencanaan pembangunan?

Karena perencanaan Pembangunan yang juga mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik RPJMN/RPJMD dan rencana pembangunan tahunan maka khusus di Provinsi Bali para perencana telah diberikan "*guidance of future actions*" yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 dan Perda Provinsi Bali nomor 16 tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Berikut dokumen RPJPD dengan konten muatan lokal dapat dilihat dari Visi dan misinya. Visi RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 yaitu "Terwujudnya Jembrana yang Jagadhita Berlandaskan Tri Hitakarana" atau "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan 3 keseimbangan" yaitu, adanya keseimbangan dan keselarasan hubungan antara : Manusia dengan Tuhan (*Sukerta Tata Agama / Baga Parhyangan*), Manusia dengan Manusia (*Sukerta Tata Pawongan / Baga Pawongan*) dan manusia dengan Lingkungannya (*Sukerta Tata Palemahan / Baga Palemahan*).

Apakah nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) masih relevan sebagai modal perencanaan pembangunan saat ini ? khususnya dalam pembangunan budaya dan karakter bangsa ? sejauh mana relevansinya ?

Masih, khususnya di Bali dengan masyarakatnya yang masih memegang teguh adat budayanya. Ruang wilayah di Bali seluruhnya merupakan total *palemahan* Desa *Pakraman* dari

Wawancara

wilayah Provinsi Bali, sehingga penataan ruang di wilayah kabupaten harus mencerminkan jati diri Budaya Bali. Sehingga pembangunan yang berjalan secara tidak langsung berjalan sesuai dengan pola kehidupan masyarakat dan aktifitasnya membentuk sistem pembangunan yang berkembang sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Bali. beberapa konsep Budaya Bali yang di gunakan dalam penatan ruang antara lain:

Tri Hita Karana adalah tiga unsur keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Sad Kertih adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih,

jana kertih dan jagat kertih.

Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala.

Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (Utara, Timur, Selatan



dan Barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa.

Tri Wana adalah tiga jenis hutan yaitu Maha Wana, Tapa Wana, dan Sri Wana, dimana Pura dengan kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut. Berkaitan dengan relevansi, saya kira ya masih sangat relevan, karena nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan warisan adiluhung

yang sudah mengakar dan sangat strategis dalam pembangunan budaya dan karakter bangsa. Puncak-puncak kearifan lokal merupakan wujud kearifan atau budaya nasional.

Dalam era keterbukaan, globalisasi, dan pasar bebas apa dampaknya terhadap nilai-nilai kearifan lokal khususnya dalam pembangunan budaya dan karakter bangsa khususnya di Bali?

Bagi Pemda, khususnya Bali, keterbukaan, globalisasi, dan pasar bebas memang mempunyai dampak yang besar terhadap nilai-nilai kearifan lokal khususnya dalam pembangunan budaya dan karakter bangsa. Pengaruh ini ada yang bersifat positif dan negatif. Pengaruh negatifnya antara lain, sekat semakin tipis antar warga bangsa. Pengaruh pasar bebas juga mengakibatkan terbentuknya manusia yang bersifat materialistik dan individualis. Pengaruh positifnya, karena Bali merupakan tujuan wisata dunia maka akan ada peningkatan kunjungan wisatawan yang memberi pemasukan devisa baik bagi Pemda dan Negara.

Bagaimana dengan karakter manusia Indonesia saat? apakah ini juga berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin ditinggalkan?

Karakter manusia Indonesia saat ini mengalami dinamika, di satu sisi kesadaran untuk membangun jati diri telah berkembang dengan baik, namun di sisi lain karena sentuhan berbagai budaya, derasnya arus informasi dan teknologi tanpa batas, maka banyak diantara komponen bangsa yang telah meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal dan lupa akan jati dirinya karena tergerus nilai-nilai asing.

Apakah pemerintah daerah memiliki strategi pembangunan daerah atau roadmap bagaimana membangun Bali dengan mengadopsi modal pembangunan dengan kearifan lokal?

Ya, contohnya, pariwisata Budaya Bali merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana*. Sebuah Desa Pakraman di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga atau kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri

Di Bali, keterbukaan, globalisasi, dan pasar bebas memang mempunyai dampak yang besar terhadap nilai-nilai kearifan lokal khususnya dalam pembangunan budaya dan karakter bangsa



serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Majelis Desa Pakraman merupakan wadah organisasi tempat berhimpunnya Desa Pakraman untuk memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah adat dan budaya Bali untuk kepentingan Desa Pakraman serta untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan. *Awig-Awig Desa* Pakraman merupakan norma-norma adat tertulis dan tidak tertulis yang mengatur kehidupan bersama di wilayah Desa Pakraman. Contoh lain adalah, Subak yang merupakan suatu masyarakat hukum adat Bali di bidang tata guna air dan atau tata tanaman yang bersifat sosio agraris, religius, ekonomis dan secara historis terus tumbuh serta berkembang. *Awig-Awig Subak* merupakan norma-norma adat tertulis dan tidak tertulis yang mengatur Subak.

Di Bidang Penataan Ruang khususnya di Bali yang paling nyata dituangkan di dalam Perda RTRW baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memasukkan Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci sebagai kawasan Perlindungan Setempat dalam Perda RTRWP maupun RTRWK. Yang dimaksud kawasan suci menurut Bhisama PHDIP 1994, adalah Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Dan untuk Kabupaten Jembrana ditambah kawasan suci loloan dan Cathus Patha. Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan perwujudan *Tri Hita Karana*, yang dilandasi oleh penerapan ajaran *Sad Kertih*, yaitu: kawasan suci gunung, kawasan suci campuhan, kawasan suci pantai, kawasan suci laut, kawasan suci mata air, dan kawasan suci *cathus patha*. Kawasan Tempat Suci menurut Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah Kekekan, dengan ukuran *Apeneleng*, *Apenimpug*, dan *Apenyengker*. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI

Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci. Rincian *Bhisama* kesucian pura adalah: Untuk Pura *Sad Kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura). Untuk Pura *Dang Kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura). Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Selanjutnya *Bhisama* Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar Pura yang berbunyi sebagai berikut: Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian Pura (daerah Kekekan) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Darmasala*, *Pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Konsep ini tidak menutup mata terhadap perkembangan pembangunan, sehingga di gunakanlah konsep Triwana untuk mengatur kawasan kesucian pura di Bali. Tri Wana adalah tiga jenis hutan yaitu Maha Wana, Tapa Wana, dan Sri Wana, dimana Pura dengan kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut.

Apakah kearifan lokal perlu “direvitalisasi” ? bagaimana caranya?

Kearifan lokal perlu “direvitalisasi” karena disamping banyak terdapat kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan perlu dipertahankan, ada juga kearifan lokal yang tidak sesuai



dengan jamanya. Cara merevitalisasi melalui kajian sosial budaya dan membudayakan dalam berbagai aspek kehidupan dengan konsep keunikan dalam adat budaya dan agama, kekhususan Bali sebagai keunggulan nasional di bidang pariwisata, keadilan dalam perimbangan keuangan sampai dengan kebutuhan “*one island, one management*”.

Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan budaya dan karakter? Bagaimana mengatasinya ?

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan budaya dan karakter adalah kurangnya panutan atau percontohan, pada umumnya pembangun budaya dengan memberi contoh bukan menjadi contoh sehingga ketika pemberi contoh berperilaku tidak sesuai, maka masyarakat turut mengikutinya. Cara mengatasinya dengan pendidikan budaya dan karakter melalui percontohan bukan memberi contoh.

BUDAYA BALI merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana.

Apakah pembangunan manusia saat ini sudah sesuai dan apakah pembangunan fisik lebih diutamakan atau pembangunan manusianya ?

Secara teori dan dokumentasi, baik di pusat berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun di daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah disusun keseimbangan antara pembangunan manusia dengan pembangunan fisik namun kenyataannya pemerintah maupun masyarakat masih memandang pembangunan fisik lebih nampak dari pembangunan manusia sehingga kecenderungan pembangunan fisik lebih dominan.

[SIMPUL]



Dok. draCill

Team Bonding SPIRIT, sebuah keharusan

Kerjasama dan kekompakan tim adalah kunci dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Begitu juga dalam program SPIRIT, program beasiswa yang merupakan kerja sama antara Bank Dunia dan pemerintah Indonesia, membutuhkan kerja sama tim di semua lini yang terlibat dalam pengelolaan program tersebut. Dalam rangka membentuk kekompakan dan kerja sama tim SPIRIT maka pada 22-24 Januari 2014 dilaksanakan pelatihan Tim Bonding SPIRIT. Pelatihan ini difasilitasi oleh *Daily Meaning*, sebuah lembaga yang bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan ini diikuti oleh para pengelola SPIRIT yang berasal dari *Project Implementing Unit* (PIU) Bappenas, PIU Kementerian Keuangan, *Project Management Unit* (PMU), Pejabat Pembuat Komitmen Pusbindiklatren Bappenas dan timnya dan perwakilan Bank Dunia yang terlibat dalam program SPIRIT.

Pelatihan 2 hari diharapkan memberikan semangat dan motivasi positif bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan program SPIRIT dan terbentuk sebuah "tim" SPIRIT yang kuat, kompak dan bekerjasama untuk mencapai tujuan program. Pelatihan yang dilaksanakan di Bandung ini mencoba membuka dan menemukan aspek-aspek yang menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan program SPIRIT. Dari diskusi dan pembahasan secara berkelompok masih dirasakan ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam kelancaran program seperti tingkat pemahaman yang belum sama dan merata tentang program, masih belum maksimalnya pengelolaan SPIRIT, hingga koordinasi dan komunikasi antar sesama pengelola program SPIRIT harus di tingkatkan. Diskusi dalam Tim Bonding ini juga memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk membuat komitmen baru masing-masing secara pribadi atas apa yang selama ini telah dijalani, dirasakan dan apa yang diperlukan untuk ke depan. Komitmen baru tersebut dituangkan oleh seluruh peserta dalam 3 hal yaitu mulai berhenti (*stop*) atas suatu kegiatan atau tindakan yang selama ini di anggap kurang baik dan berdampak pada kinerja,

kemudian melanjutkan (*continue*) sesuatu yang sudah baik dan memulai (*start*) sesuatu yang di akan meningkatkan semangat dan kinerja. Harapan pelatihan ini adalah seluruh peserta melaksanakan komitmen baru tersebut dan bermuara pada kesuksesan program SPIRIT dimana tujuan program SPIRIT dalam jangka panjang adalah mereformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi dan profesionalismenya, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Pusbindiklatren dalam sambutan pembukaan pelatihan ini. Bravo Tim SPIRIT.





Dok. Tyaz

NETWORKING

Pusbindiklatren Bappenas melakukan kunjungan ke 10 universitas di Australia untuk menjalin kerjasama

10 Hari Berkunjung Ke 10 Universitas Di Queensland, Australia

Oleh: Dwi Harini Septaning Tyas

Pusbindiklatren Bappenas sebagai pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan pelaksana program Pendidikan dan Pelatihan bagi perencana di seluruh Indonesia selalu berupaya untuk mengurangi kesenjangan kompetensi para perencana dan memenuhi kebutuhan wawasan dan pembelajaran agar perencanaan yang dihasilkan dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan perencanaan gelar dan non-gelar, diantaranya program S-2 dalam negeri, S-2 luar negeri, S-2 *Linkage*, S-3 dalam negeri, S-3 luar negeri, *short course* di dalam dan luar negeri serta *linkage*.

Memperluas kerjasama dengan program studi ke beberapa universitas di dalam negeri maupun luar negeri juga merupakan

agenda yang tidak terpisahkan dari kegiatan Pusbindiklatren Bappenas. Perluasan kerjasama ini bertujuan untuk menjalin *networking* dalam pelaksanaan program diklat serta penelitian di universitas. Sampai saat ini Pusbindiklatren Bappenas telah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas luar negeri yang tersebar di Jepang, Belanda, Perancis, dan Australia. Dalam kaitannya dengan perluasan kerjasama ini, pada tahun 2013 Pusbindiklatren Bappenas mengikuti kegiatan *Queensland Excellence in Research Familiarisation Tour in Ten Universities* yang diselenggarakan oleh *Trade and Investment of Queensland, Australia*. Kesempatan tersebut menjadi ajang bagi Pusbindiklatren Bappenas untuk mengetahui lebih dalam dan melihat secara langsung program studi, penelitian, serta fasilitas yang dimiliki Universitas di wilayah tersebut.

Kegiatan *Queensland Excellence in Research Familiarisation Tour in Ten Universities* ini diikuti oleh 14 orang peserta yang berasal dari berbagai negara yaitu Vietnam, Thailand, Colombia, Peru, Malaysia, Argentina, dan Indonesia. Mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan beasiswa di

negaranya masing-masing sehingga hal tersebut juga menjadi kesempatan yang baik bagi Pusbindiklatren Bappenas untuk menjalin *networking*.

Selama 10 hari mengikuti kegiatan *Queensland Excellence in Research Familiarisation Tour* ini, kami mengunjungi 10 universitas tersebar di wilayah Queensland yaitu Brisbane, Toowoomba, Gold coast, Sunshine Coast, dan Townsville. Ke sepuluh universitas tersebut adalah Queensland University of Technology (QUT), University of Southern Queensland (USQ), Bond University, Southern Cross University (SCU), Griffith University, University of Sunshine Coast (USC), James Cook University (JCU), Australian Catholic University, Central Queensland University (CQU), dan University of Queensland (UQ).

Keunggulan kualitas universitas yang kami kunjungi dibuktikan dengan terdaptarnya dalam daftar universitas terbaik di dunia seperti Times Higher Education (THE) World University Rankings dan QS World University Rankings. Selain itu, dukungan dari tersedianya berbagai *research center* juga mempengaruhi kualitas universitas tersebut di mata dunia. UQ tercatat dalam top 100 universitas terbaik versi THE dan QS world, Griffith University tercatat dalam top 400 universitas terbaik versi THE dan QS world, sedangkan James Cook University merupakan *lead university* dalam *tropic discipline research*.

Saat ini Pemerintah Queensland bersama-sama dengan universitas di Queensland sedang memprioritaskan pendidikan tinggi yang berbasis "*international research*" yang dapat dilaksanakan di Australia atau negara asal mahasiswa. Bentuk mekanisme pendidikan ini (*Master, Doctoral*) dapat disesuaikan dengan *project* atau *research* yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagian besar universitas di Queensland menawarkan beberapa variasi pelaksanaan program *Master* dan *Doctoral* yang diantaranya adalah:

- *Linkage/ Twinning/ Double Degree/ Sandwich Program*, dimana pendidikan berlangsung di Australia dan negara lain atau negara asal mahasiswa serta gabungan dari beberapa mata kuliah dari disiplin ilmu yang berbeda.
- *Master/ Doctoral Programs by coursework*.
- *Master/ Doctoral Programs by research*.
- *Professional Doctoral Program*, yang ditargetkan untuk para profesional dan juga *government official* yang lebih difokuskan pada pengembangan profesi dari mahasiswa.
- *Master dan Doctoral Program* melalui *e-education/ e-learning/ distance learning/ online*, dimana mahasiswa tidak perlu mengikuti perkuliahan di kelas.

Dari kegiatan ini terlihat bahwa Universitas di wilayah Queensland Australia, selain menawarkan pengalaman belajar dan fasilitas yang baik bagi mahasiswanya, juga menyediakan banyak variasi pelaksanaan studi yang memungkinkan mereka lebih fleksibel dalam menjalani studi. Akhir kata kami sampaikan semoga tulisan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi calon mahasiswa yang saat ini sedang mencari universitas di Australia, khususnya wilayah Queensland.



Info Session Universitas- universitas dari Inggris



Pada 7 Februari 2014, bertempat di gedung Pusbindiklatren Bappenas diadakan acara Info Session dengan universitas-universitas dari Inggris:

- University of Birmingham
- Aston University
- Brunel University
- University of Reading
- Northumbria University
- University of Glasgow
- University of Newcastle
- University of Nottingham
- University of Leeds

Acara ini bertujuan untuk memberi informasi kepada para calon penerima beasiswa SPIRIT tentang bagaimana studi di Inggris.





Mini Fair Universitas-universitas dari Australia

Pada 25 Februari 2014 beberapa universitas dari Australia berpartisipasi dalam acara "Mini Fair Education" bertempat di Gedung Pusbindiklatren Bappenas. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengenalkan universitas-universitas pilihan yang ada di Australia kepada calon penerima beasiswa SPIRIT, sehingga mereka memiliki gambaran mengenai kampus yang akan mereka pilih.

Universitas-universitas yang berpartisipasi dalam acara ini adalah:

- Australian National University
- Carnegie Mellon University
- Curtin University
- Charles Darwin University
- Deakin University
- Flinders University
- Griffith University
- La Trobe University
- Monash University
- Murdoch University
- Queensland University of Technology
- RMIT University
- University of Adelaide
- University of Canberra
- University of Melbourne
- University of New South Wales
- University of New England
- University of Queensland
- University of South Australia
- University of Western Australia
- Victoria University
- University of Southern Queensland (USQ)
- University of Technology Sydney (UTS)



Dok. Jajang Muhari

MET UNPAD 2011-2012



Dok. Koleksi pribadi

Oleh: **Heni Tinggal Mulyani**
Alumni Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas di
Program MET UNPAD

MIMPI YANG MENJADI NYATA

Melanjutkan sekolah ke jenjang S-2 adalah mimpiku sejak dulu, yaitu sejak aku lulus S-1 IPB Tahun 1997. Ketiadaan biaya adalah alasan mengapa mimpi itu tidak juga bisa terwujud. Setelah lulus S-1 aku mulai bekerja sebagai *Community Organizer* di beberapa daerah. Terakhir aku bekerja sebagai *Community Organizer* bidang

KELUARGA BESAR

Aku (Baris depan no.5 dari kiri) Berfoto-foto bersama keluarga besar baruku

Keirigasian Konsultan Asing, *Black n Veatch* di Kabupaten Garut. Setelah menikah pada Tahun 2002, aku berhenti bekerja dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Sejak saat itu mimpi sekolah lagi kuanggap tidak akan pernah terwujud. Tahun 2004, aku mendapat informasi ada penerimaan PNS yang katanya berbeda dengan penerimaan PNS sebelumnya karena dalam rangka 100 hari SBY. Maka aku menjadi sangat berminat untuk ikut melamar menjadi PNS. Alhamdulillah Tahun 2005 aku mulai terhitung menjadi CPNS di Kabupaten Bandung dan ditempatkan di Bidang Bina Usaha Dinas Peternakan dan Perikanan. Dengan dimulainya bekerja maka mimpiku untuk sekolah pun hadir



Dok. Koleksi pribadi

DI KELAS bersama senter kuning yang selalu setia menemaniku

kembali. Namun mimpi itu kembali pudar ketika pada Tahun 2007 aku mengidap "low vision" karena adanya pendarahan di retina, tepat di tahun aku melahirkan putri keduaku. Sedikit demi sedikit daya penglihatanku semakin menurun hingga pada akhirnya aku sama sekali tidak bisa membaca. Sekitar 3 bulan aku mencoba dan mencoba berobat kemana-mana hingga akhirnya walaupun tidak bisa sembuh total penglihatanku mulai membaik sehingga dapat membaca walaupun harus membawa senter untuk membaca dan memperbesar view untuk mengetik di komputer.

Mulai tahun 2009 aku sudah mendapat kabar bahwa ada program beasiswa dari Pusbindiklatren. Tentu saja ini kabar yang sangat baik buat aku yang berharap dapat mewujudkan mimpiku untuk sekolah walaupun ada kekhawatiran aku tak bisa meraihnya karena kondisi mataku. Akan tetapi dengan tekad yang kuat aku mencoba dan terus mencoba mengikhti tes untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Yang kuingat sepertinya test TPA dan TOEFL yang aku ikuti tidak hanya cukup sekali. Tapi aku tak putus asa, ikut dan ikut kembali walaupun dengan membawa senter untuk mengikuti testnya. Alhamdulillah pengawas menijinkan aku membawa senter ke ruang ujiannya di ITB waktu itu. Sampai Tahun 2010 aku belum juga mendapatkan rejeki untuk sekolah dan aku mulai mengubur mimpi itu mengingat usiaku yang mendekati 40 tahun. Hingga pada akhirnya tahun 2011 aku ditelepon dari Program Pasca Sarjana UNPAD yang mengabarkan bahwa aku menjadi salah satu peserta beasiswa pusbindiklatren. Pada mulanya aku tidak percaya kemudian setelah saya konfirmasi ke kakak kelas yang di UNPAD

juga menanyakan identitas penelepon barulah aku percaya. Perasaanku saat itu luar biasa senangnya, bagaimana tidak mimpiku yang timbul tenggelam akhirnya dapat terwujud. Segera aku sampaikan kabar ini sama suami. Dan suami sangat mendukungnya membuat kebahagiaan itu semakin bertambah. Hanya saja kebahagiaan itu sempat terusik dengan kekhawatiran tidak dapat mengikuti program tersebut sampai selesai mengingat keterbatasan di mataku. Tapi aku mencoba menepisnya dengan tekadku untuk lebih giat belajarnya nanti.

Minggu pertama matrikulasi cukup membuat aku stres, di samping mata kuliah matrikulasi yang cukup berat menurutku ; matematika, statistik, makro dan mikro ekonomi juga dengan tugas tugas yang cukup banyak. Sampai pada minggu ke empat stres yang menimpa aku menyebabkan penglihatan mulai menurun lagi. Hal ini juga dimungkinkan karena aku kecapekan. Pertimbangan kedua puteriku menjadikan aku tidak dapat kos di dekat tempat kuliah. Sehingga aku pergi kuliah adari rumahku di Soreang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus sekitar 30 Km hanya saja jalan yang dilewati adalah jalan padat sehingga kemacetan menjadi hal yang sangat biasa bagiku untuk pergi dan pulang kuliah. Aku harus pergi minimal 2 jam sebelum kuliah dimulai agar tidak terlambat. Dengan kondisi tersebut tidak jarang aku tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Hingga pada akhirnya berbekal surat dokter mataku aku melapor pada sekretaris program dengan keterbatasaku itu. Alhamdulillah lagi-lagi saya mendapat kemudahan. Sekretaris program, waktu itu Dr. Fahmi memberikan kebijaksanaan untuk mengerjakan tugas semampunya dan bahkan menawarkan fasilitas kampus yang dapat aku perlukan untuk membantu aku mengikuti kuliah. Tapi aku hanya minta pengadaan

Sosok Alumni

lampu belajar saat ujian agar aku dapat mengerjakannya. Awalnya aku risih juga kemana mana bawa senter. Tapi lama kelamaan teman-teman paham dan aku mulai “nyaman” dengan kelas kuliahku bahkan lebih nyaman dari kelas kuliah S-1ku. Teman-teman di S-2 bagaikan keluarga besar baruku. Semuanya saling mendukung demi kesuksesan sekolah. Satu lagi yang tidak dapat kulupakan ketika dosen matematika, Ibu suryani yang khusus memberikan aku makalah dengan ukuran *font* yang besar karena tahu aku punya keterbatasan. Subhanallah... Maha kasih-Nya tak terhingga untuku. Aku merasa sangat dimanjakan OlehMu Yaa Rabb dengan banyaknya kemudahan yang aku terima.

Setelah selesai matrikulasi, aku mencoba menikmati perkuliahan walaupun dengan bantuan senter aku dapat melalui semester satu. Mulai memasuki semester kedua aku makin mulai bisa menikmati perkuliahan. Situasi nyaman dalam perkuliahan menyebabkan kondisi matakuliahku mulai membaik dan secara berangsur-angsur ketergantungan dengan senter mulai berkurang. Hingga pada akhirnya nilai-nilai semester dua jauh lebih baik dibanding nilai semester pertama.

Diterimanya aku di Jurusan pembangunan dan perencanaan Fakultas ekonomi adalah cita-citaku. Dengan latar belakang pendidikan S-1 ke sosial ekonomi perikanan, mata kuliah yang aku terima di S-2 ini sebetulnya tidak terlalu asing. Sebagian besar

“Mulai memasuki semester kedua aku makin mulai bisa menikmati perkuliahan. Situasi nyaman dalam perkuliahan menyebabkan kondisi matakuliahku mulai membaik dan secara berangsur-angsur ketergantungan dengan senter mulai berkurang”

aku telah menerima mata kuliah itu di S-1. Terlebih skripsi aku juga memang syarat dengan “perencanaan”. Walaupun berbeda metodologi skripsi aku bertepatan perencanaan pembangunan yang banyak sekali aku temukan tema tersebut di perpustakaan pasca sarjana program pembangunan dan perencanaan tempat kuliah S-2ku ini.

Dengan bimbingan Prof. Dr. Rina indiasuti dan Dr, Purnagunawan aku mulai menulis thesisku. Dengan harapan bahwa ilmu yang aku dapat dimanfaatkan pada saat aku bekerja kembali juga latar belakang pendidikan yang kumiliki, maka aku tidak mencoba laah

untuk mencoba penelitian dengan data sekunder, maka aku memutuskan untuk melakukan penelitian tentang “produktivitas lahan



ILMU yang kudapat
semoga juga membawa
berkah untuk keluarga
kecilku tercinta



SAHABAT

penyemangat kedua terbesar setelah keluarga

Kali kedua yang aku rasakan betapa ilmu itu bermanfaat adakah ketika aku menjadi salah satu peserta untuk mengikuti pembahasan *site plan* kawasan perikanan. Disana aku mulai

pada usaha pembenihan ikan lele di Kabupaten Bandung. Aku dibantu petugas penyuluh lapangan melakukan survey kepada pembudidaya pembenihan lele di sentra pembenihan di Kabupaten Bandung. Sekitar dua minggu aku mengambil sampel untuk kemudian diolah kemudian pada tanggal 12 Februari aku berhasil melalui sidang dengan nilai yang bagiku sangat memuaskan.

Bulan Maret 2013 aku mulai aktif bekerja kembali. Banyak tugas kantor yang menanti untuk aku mulai kerjakan. Hasratku untuk mengaplikasikan ilmuku pertama aku lakukan ketika aku memfasilitasi keikutsertaan UKM CV. DAB SUBUR (produsen abon lele kremes) untuk mengikuti lomba UKM Pengolahan Hasil perikanan. Salah satu persyaratannya adalah membuat profil atau selayang pandang CV. DAB Subur. Dengan bekal *Bussines Plan* dalam mata kuliah kewirausahaan aku mencoba membuat profil CV. DAB SUBUR sehingga CV DAB SUBUR dapat mengikuti lomba UKM tersebut. Dengan berbagai penilaian pada akhirnya CV DAB SUBUR menjadi juara I Pengolahn Hasil Perikanan tingkat Nasional sehingga berhak mendapatkan penghargaan "Adibhakti Mina Bahari". Tentu saja prestasi ini bukan semata karena profil yang aku buat. Disini aku hanya ingin menggaris bawahi bahwa ilmuku yang kudapat telah banyak membantu aku untuk dapat meningkatkan kinerjaku. Jadi paling tidak ilmu yang kudapat telah bermanfaat minimal untukku.

menyadari betapa ilmu yang kudapat dapat berarti buat aku. Aku dapat lebih memahami perencanaan wilayah terlepas dari diakomodasi atau tidak, aku dapat memberikan masukan-masukan dalam pembahasan tersebut. Lagi-lagi ini memberikan pembuktian bahwa ilmu itu sangat berarti, walaupun baru sebatas arti untuk diri sendiri yang mudah-mudahan ini menjadi awal untuk ke depan dapat lebih membawa arti untuk orang yang lebih banyak, masyarakat atau bahkan dan negara. Semoga.

Demikian pengalaman yang dapat aku berikan. Harapan aku buat teman teman yang ingin belajar jangan berputus asa untuk mencari kesempatan. Saat ini banyak sekali peluang kita untuk belajar. Usia jangan jadi penghalang untuk kita belajar. ".....*Siapa bilang emak-emak tidak bisa sekolah hehehehe.....*". Buat Pusbindiklatren aku mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan kesempatan aku untuk menimba ilmu. Semoga program ini dapat berlangsung terus, terus dan terus. Satu harapan lagi semoga Pusbindiklatren dapat memfasilitasi aku menjadi "Pejabat Fungsional Perencana" dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencana yang semakin membuat aku tertarik. (dikasi hati minta jantung nih ceritanya ...hehehe)



AKADEMIKA

Sumber: <http://teguhhdh.files.wordpress.com/2011/06/masjid-raja-aceh.jpg>

Ringkasan Disertasi

An Indonesian Community Policy Study for Tsunami Resilient Preparedness in Moslem Society

Wignyo Adiyoso

Graduate School of Policy Science
Ritsumeikan University

Dalam sepuluh terakhir ini terjadi peningkatan frekuensi kejadian bencana alam yang menimbulkan kerusakan di segala kehidupan manusia termasuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Sejak *Hyogo Framework for Action* (HFA) 2005-2015 yang diadopsi oleh 168 negara, usaha-usaha untuk pengurangan risiko bencana (PRB) telah dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Meskipun pendekatan fisik dapat mengurangi ancaman risiko akibat bencana alam, muncul pengakuan bahwa pengurangan risiko bencana akan lebih efektif bila berpusat juga pada manusianya.

Tujuan studi ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang kebijakan pengembangan masyarakat untuk penguatan

kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bahaya tsunami dalam konteks agama di Indonesia. Pokok argumen dalam studi ini adalah bahwa PRB akan efektif bila berpusat pada manusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang melekat pada masyarakatnya. Peran agama dalam pasca-bencana telah lama diteliti, tapi peran dalam pre-bencana yang biasanya diasosiasikan dengan pandangan *fatalistic view* belum banyak diteliti. Studi ini mengajukan hipotesis bahwa nilai-nilai positif ajaran Islam terhadap bencana alam dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bahaya tsunami. Disertasi ini juga mengembangkan dan melakukan penilaian terhadap index *tsunami resilient preparedness* (TRP) yang meliputi dimensi-dimensi



Sumber: http://i38.photobucket.com/albums/e121/unclebenny_3/Akibat_Tsunami/Akibat_Tsunami_01.jpg
<http://mymoen.files.wordpress.com/2012/12/potret-blangpadang-pasca-gempa-dan-tsunami.jpg>

early warning system (TEWS), Emergency Plan, dan Capacity yang didasarkan kosnep jenjang sosial termasuk individu, keluarga, tetangga dan masyarakat. Studi ini dilaksanakan di 3 (tiga) masyarakat yang rentan terhadap tsunami, yaitu Kushimoto Wakayama Jepang, Bantul Yogyakarta dan Banda Aceh Indonesia. Gambaran tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, *literature review*, kerangka berpikir disertasi ini termuat dalam Bab 1.

Di dalam Bab 2, disertasi ini membahas tentang pengembangan dan penilaian TRP di 3 (tiga) masyarakat tempat studi. Metode pengembangan index ini melibatkan ahli kebencanaan, masyarakat

setempat melalui proses pengkajian teori, wawancara mendalam, penilaian oleh ahli terseleksi dan pengujian di lapangan yang menghasilkan TRP yang diyakini bisa diterapkan untuk mengukur kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bahaya tsunami. Selanjutnya TRP digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan masyarakat yang dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesiapsiagaan masyarakat secara aktual dalam menghadapi bahaya tsunami di 3 masyarakat yang berbeda karakteristiknya. Index TRP ini juga menggambarkan kelebihan dan kekurangan setiap masyarakat melalui perbedaan detail setiap item TRP yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh masyarakat. TRP ini dapat dijadikan sebagai alat analisis kebijakan dan menentukan upaya intervensi ke masyarakat bagi para pembuat kebijakan di bidang kebencanaan. Terpenting lagi bahwa TRP ini terbukti dapat

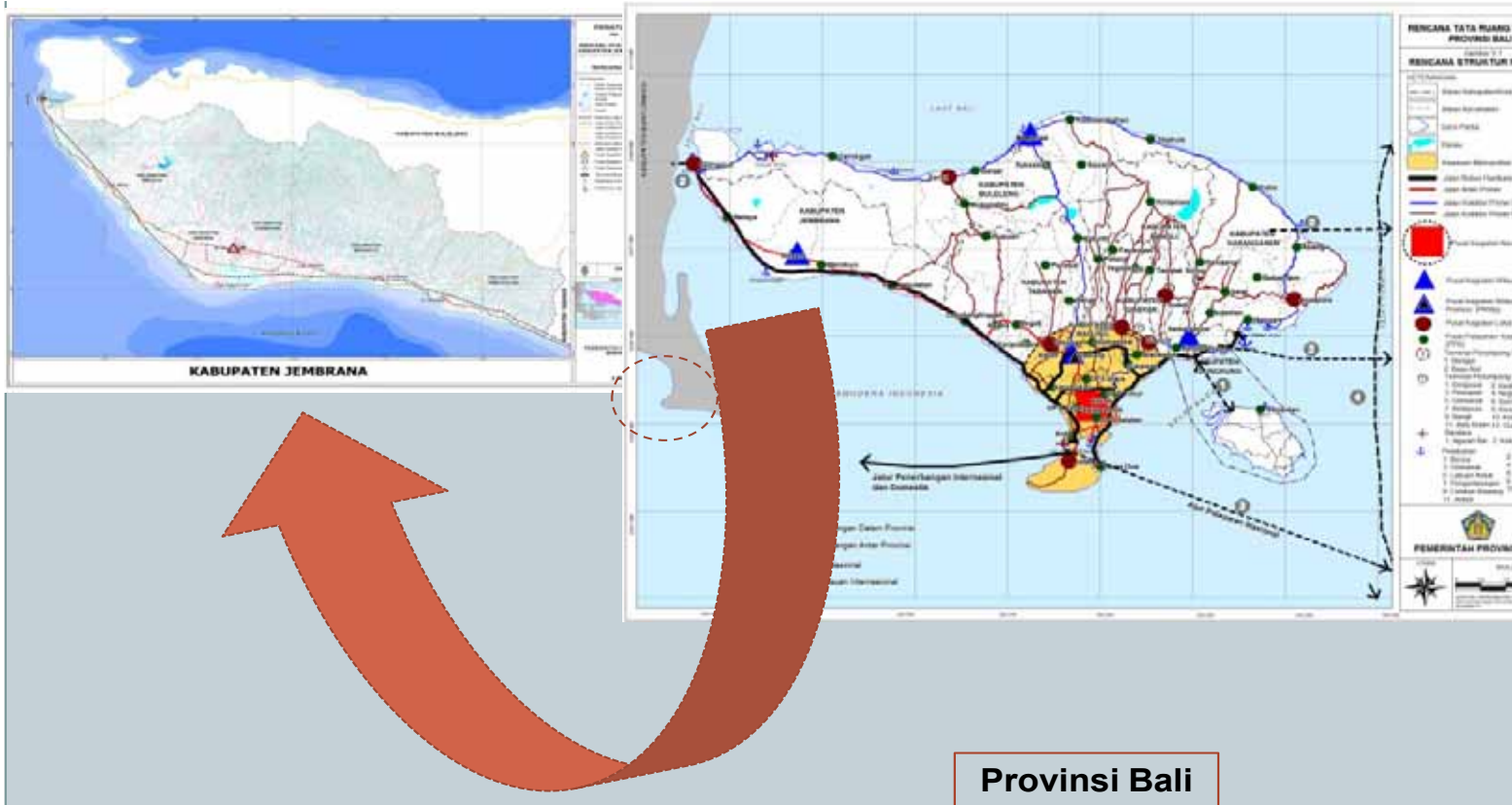
diaplikasikan lintas masyarakat yang memiliki perbedaan sosial dan budaya.

Bab 3 disertasi ini membahas tentang seberapa jauh faktor-faktor keyakinan terhadap pandangan agama Islam tentang bencana mempengaruhi perilaku dan tindakan kesiapsiagaan seseorang dalam menghadapi bahaya tsunami melalui skor TRP. Faktor-faktor agama Islam diantaranya adalah seperti keyakinan bahwa melakukan persiapan menghadapi bahaya tsunami adalah sesuai dengan ajaran agama Islam (*optimistic view*), meyakini bahwa para pemimpin agama juga melakukan persiapan menghadapi bahaya tsunami karena sesuai dengan ajaran Islam (keyakinan ke pemimpin Agama) dan meyakini bahwa para tetangga melakukan persiapan menghadapi bahaya tsunami karena sesuai dengan ajaran Islam (keyakinan ke pemimpin Agama) sebagai *independent variable*. Sedangkan *dependent variabelnya* adalah 12 item TRP yang menunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara individu atau bersama-sama dengan tetangga dan masyarakat luas dalam menghadapi bahaya tsunami seperti mencari informasi tentang seluk-beluk tsunami, mengetahui dan selalu memperbaharui peringatan tanda tsunami, melakukan latihan evakuasi, melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat, memiliki dan menyiapkan alat-alat darurat (senter, makanan, minuman, obat-obatan dll). Hasil penelitian yang dilakukan di Bantul Yogyakarta dan Aceh menunjukkan bahwa *optimistic view* dapat memprediksi sebagian dimensi TEWS, *Emergency Plan dan Capacity* atas data gabungan di kedua masyarakat. Keyakinan kepada pemimpin agama dan tetangga juga menunjukkan pengaruh positif walaupun tidak semua item TRP. Hasil perbandingan di kedua masyarakat menunjukkan perbedaan dimana di Yogyakarta bahwa keyakinan terhadap pemimpin agama lebih efektif dibanding di Aceh yang menunjukkan keyakinan tetangga lebih berpengaruh kepada tindakan untuk melakukan kesiapsiagaan tsunami.

Sebagai konsekuensi atas temuan penelitian dalam Bab 3 di atas, Bab 4 menguji intervensi terhadap pengaruh agama melalui media cetak di masyarakat Bantul Yogyakarta. Dua kelompok besar dijadikan subyek penelitian, dimana kelompok 1 diberikan brosur yang berisikan pesan tentang nilai-nilai ajaran Islam yang dapat mendorong untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan tsunami, dan kelompok masyarakat satunya hanya diberikan brosur standr tanpa mencantumkan nilai-nilai ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media informasi tsunami yang diberikan muatan ajaran agama Islam dalam menghadapi bahaya tsunami lebih efektif menggerakkan orang untuk melakukan kesiapsiagaan tsunami walaupun tidak semua item TRP. Dalam kelompok 1 (yang diberikan brosur dengan muatan ajaran agama Islam), dilakukan perbedaan perlakuan yaitu satu kelompok dilakukan intervensi dengan melibatkan pemimpin agama dan satunya lagi tidak ada pelibatan pemimpin agama. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kelompok yang didukung penyebaran brosur oleh pimpinan agama lebih efektif. Temuan ini sangat penting untuk dikembangkan dimana muatan ajaran Islam dalam media informasi kebencanaan positif mendorong orang untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan menghadapi bahaya tsunami. Peran pemimpin agama yang memiliki pandangan bahwa agama positif terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana juga dianggap penting.

Studi ini walaupun memiliki keterbatasan sangat penting untuk membuka cakrawala baru dan memberikan tantangan terhadap doktrin lama bahwa pandangan agama terhadap bencana selalu negatif (*fatalistic view*). Studi lanjutan yang melibatkan pemimpin agama dan lintas agama sangat penting untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan detail terhadap peran agama dan agama-agama lain dalam mendukung tindakan-tindakan manusia untuk menyiapkan-siagakan diri menghadapi bahaya tsunami.





Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2012

Posisi Kabupaten
Jembrana di Provinsi Bali

KEARIFAN LOKAL DALAM RTRW DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Oleh: Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd *)

Perencana Utama pada Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

Kondisi Umum Kabupaten Jembrana

Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan

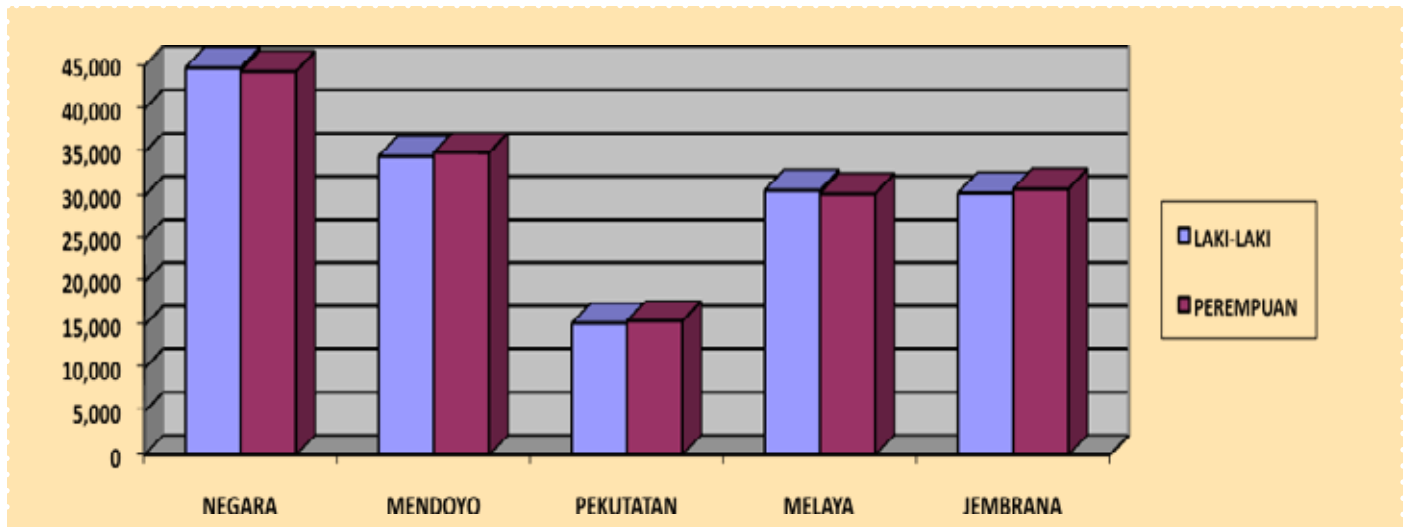
Kabupaten Karangasem di sebelah utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Provinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Provinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng.

Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah.

Demografi

Pada tahun 2012 berdasarkan laporan kependudukan *database* SIAK, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana adalah sebesar 311.117 jiwa terdiri dari laki-laki 158.398 jiwa, perempuan 158.739 jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (*Sex Ratio*) di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2012 mencapai 158.398 berbanding 158.719 atau 99,79 yang berarti bahwa setiap 100 orang laki-laki bisa dipasangkan dengan 99,81 orang perempuan.

Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber data : SIAK Kabupaten Jembrana per Desember 2012.

Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana

Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Dari ke-9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi Sektor Primer (Pertanian,

“Pengaturan Kearifan lokal dalam RTRW Kabupaten Jembrana diatur dalam pasal 2, disebutkan RTRWK disusun berdasarkan Tri Hita Karana”

Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Dalam kurun waktu periode tahun 2009 – 2012, struktur perekonomian Kabupaten Jembrana mengalami sedikit pergeseran/perubahan seperti tabel berikut :

PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2012

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian	857.113,42	903.027,21	1.045.290,00	1.056.917,33
2	Penggalian	15.849,51	17.685,84	20.000,00	22.581,55
3	Industri	244.703,82	280.344,61	323.050,00	330.434,02
4	Listrik dan Air Minum	54.449,25	62.017,73	73.110,00	82.406,81
5	Bangunan	211.532,26	237.085,91	273.840,00	301.174,56
6	Perdagangan, Hotel, Retoran	802.114,91	899.558,40	948.210,00	1.157.322,27
7	Pengangkutan, Komunikasi	528.851,81	582.575,18	628.740,00	706.931,34
8	Perbankan /Keuangan Jasa	158.883,19	175.114,91	206.120,00	206.605,02
9		403.766,27	446.728,59	520.680,00	539.164,02
	Total	3.277.309,44	3.604.138,38	4.039.040,00	4.403.536,92

Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2013

PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2012

PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Jembrana tahun 2010-2012 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Tahun 2010 PDRB per kapita Kabupaten Jembrana baru mencapai Rp. 13.747.280,88 meningkat menjadi Rp 14.739.912,09 pada tahun 2011 dan terus meningkat menjadi Rp. 16.431.107,89 pada tahun 2012 .

Indeks Gini

Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rasionya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rasionya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jembrana untuk kurun waktu 2005 – 2009 pada tabel berikut :

Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2008 – 2012

No	Tahun	Gini Ratio
1	2009	23,69
2	2010	25,75
3	2011	40,20
4	2012	40,01

Sumber data : BPS Kab. Jembrana Tahun 2013

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2008– 2012 Kabupaten Jembrana Gini Rationya terkategori ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (9 sektor).

Kearifan Lokal Dalam RTRW Kabupaten Jembrana

Pentingnya Pengaturan Kearifan lokal Dalam RTRW Kabupaten Jembrana

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka tiga tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, dan menjadi matra ruang dari Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2005-2025. Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan acuan penyusunannya, sehingga perlu diganti; sehingga Kabupaten Jembrana menetapkan Perda Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

Kearifan lokal, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 diatur melalui; kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang. Kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang diupayakan tetap mempertahankan kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang di masyarakat agar pemanfaatan ruang tetap menjamin kebutuhan masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Konten Pengaturan Kearifan lokal Dalam RTRW Kabupaten Jembrana

Perda nomor 11 tahun 2012 sebagai hukum positif, disusun berdasarkan arah kebijakan serta strategi yang dilandasi oleh kearifan lokal. Konten Pengaturan Kearifan lokal dalam RTRW Kabupaten Jembrana diatur sebagai berikut; dalam pasal 2 disebutkan ; RTRWK disusun berasaskan: *Tri Hita Karana, Sad Kertih, Keterpaduan, Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, Keberlanjutan, Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, Keterbukaan, Kebersamaan dan kemitraan, Perlindungan kepentingan umum, Kepastian hukum dan keadilan, dan Akuntabilitas.*

Tri Hita Karana dan Sad Kertih merupakan kearifan lokal yang mengajarkan kepada masyarakat dalam pemafaatan ruang wajib memedomani hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya sehingga kesinambungan hidup dapat tercapai. Selanjutnya dalam pasal 3 sub d ditegaskan bahwa acuan *sukerta*

tata palemahan desa adat/pakraman, yang selanjutnya menjadi bagian dari awig-awig desa adat/pakraman di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana didasarkan pada kearifan lokal.

Terkait dengan pelaksanaan Tri Hita Karana lebih lanjut diamanatkan sebagai berikut ; Pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali diwujudkan dengan strategi meliputi: melindungi dan melestarikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan lokal dalam wilayah, mengembangkan partisipasi masyarakat dan konsep-konsep kearifan lokal dan budaya Bali dalam pelestarian lingkungan, mencegah kegiatan budidaya pada kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta



penertiban kegiatan terbangun yang berada pada kawasan lindung, mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun baik akibat aktivitas pembangunan maupun akibat bencana alam, mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan yang beririgasi (*subak*) untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya.

Konsep Tri hita Karana sebagai pegangan dalam penataan ruang, termasuk dalam pengembangan pariwisata sebagaimana diatur dalam pasal 11 sebagai berikut : Pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan diwujudkan dengan strategi meliputi: mengembangkan Kawasan Pariwisata Candikusuma dan Kawasan Pariwisata Perancak didukung daya tarik pantai, ekosistem pertanian dan pesisir yang berwawasan lingkungan, memantapkan dan mengembangkan sebaran desa-desa wisata dan daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis ekowisata, memantapkan partisipasi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, memantapkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok industri pariwisata, menguatkan eksistensi *desa pakraman*, *subak* dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, melindungi dan melestarikan kawasan lindung, kawasan pesisir dan laut serta kawasan budidaya pertanian yang berpotensi sebagai daya tarik wisata dan mengembangkan pola kerjasama yang memberikan perlindungan kepada hak-hak kepemilikan lahan masyarakat lokal.

Tentang Kearifan lokal berikutnya diatur dalam penetapan kawasan pada pasal 31 sebagai berikut ; Kawasan suci meliputi: kawasan suci gunung, kawasan suci campuhan, kawasan suci pantai, kawasan suci laut, kawasan suci mata air dan kawasan suci *cathus patha*.

Kawasan suci gunung sebarannya meliputi seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45° (empat puluh lima derajat) pada badan gunung menuju ke puncak gunung meliputi lereng dan puncak Gunung Merbuk, Gunung Bangol, dan Gunung Mesehe. Kawasan suci campuhan sebarannya meliputi seluruh pertemuan

aliran 2 (dua) buah sungai wilayah kabupaten; Kawasan suci pantai sebarannya meliputi tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara *melasti* di seluruh pantai wilayah kabupaten, meliputi: Pantai Gilimanuk, Pantai Melaya dan Pantai Candikusuma di Kecamatan Melaya, Pantai Pengambengan di Kecamatan Negara, Pantai Yeh Kuning di Kecamatan Jembrana, Pantai Delodberawah, Pantai Tembles, Pantai Rambutsiwi dan Pantai Yehsumbul di Kecamatan Mendoyo, Pantai Pangkung Jukung, Pantai Gumbrih, Pantai Medewi, Pantai Pahyangan dan Pantai Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan.

Kawasan suci laut sebarannya meliputi kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu dan umat lainnya di wilayah kabupaten; Kawasan suci mata air sebarannya meliputi tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Kawasan suci *cathus patha* , sebarannya meliputi: *Cathus patha agung* wilayah kabupaten di pusat Kawasan Perkotaan Jembrana pada simpang wilayah Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, *Cathus patha alit* tersebar di tiap-tiap wilayah desa adat/pakraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Konsep kearifan lokal Tri Hita Karana telah mendapat pengakuan dunia secara universal dalam berbagai pertemuan termasuk dalam APEC di Bali bulan November Tahun 2013.

Penutup

Konsep kearifan lokal Tri Hita Karana yang mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya merupakan warisan adhi luhung yang hingga kini tetap dipegang teguh masyarakat Bali. Konsep Tri Hita Karana telah mampu memberikan inspirasi dunia dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan sesuai daya dukung lingkungan. Peningkatan konsep Tri Hita Karana dalam pembangunan akan berdampak negatif bagi daya dukung dan keseimbangan alam.

Sumber referensi :

1. Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032
 2. RKPD Kabupaten Jembrana 2014
 3. Jembrana Dalam Angka Tahun 2013
- *) Anggota Tim Perencana Pada Bakor Tata Ruang Kabupaten Jembrana

Memfaatkan Peluang Tersisa dan Menumbuhkan Peluang Baru

Oleh: Sahat Sinaga

Perencana Madya Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

Dengan mengeluarkan uang sebesar US\$ 556,7 juta dari APBN-P 2013 atau sekitar Rp.7.T kepada pihak Jepang, maka di akhir tahun 2013 PT.Inalum secara resmi telah menjadi milik Indonesia sepenuhnya. Itulah cara ampuh yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri kerjasama dengan pihak Jepang sesuai dengan *Master Agreement* yang ditandatangani di Tokyo pada tahun 1975, maklum setelah mereka mendominasi pengendalian PT.Inalum selama lebih dari 30 tahun. Keberadaan PT.Inalum ini berpusat di Asahan, Sumatera Utara, memiliki kapasitas terpasang untuk memproduksi sekitar 225.000 ton alumunium per tahunnya,

merupakan industri alumunium terbesar di Asia Tenggara dengan dukungan hidrolistrik dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala besar, pelabuhan Kuala Tanjung dan berbagai aset lainnya.

Menjelang perubahan status PT.Inalum yang kita ikuti dari pemberitaan media massa baik menyangkut pernyataan para Menteri terkait bidang ekonomi dan komentator, terkesan kita begitu bangga memiliki industri strategis dan berskala internasional. Kebanggaan yang diiringi rasa syukur tersebut bagaikan menyambut kedatangan/kembalinya anak yang selama ini hilang, dengan tebusan sejumlah uang tentunya.

Setuju kalau dikatakan keberadaan PT.Inalum pada saat ini dan kedepan dinilai demikian strategis, dalam hal tersebut tentu saja apabila dapat ditunjukkan bahwa kegiatan perusahaan dimaksud memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Nasional. Oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana kondisi masa lalunya dan harapan pada masa sekarang. Lebih dari itu, kita juga perlu melihat bagaimana kesinambungan industri dimaksud di masa yang akan datang.

Masa Lalu

Konon beritanya PT.Inalum dibangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian antara Pemerintah Indonesia – Jepang. Secara ekonomi berdasarkan pembagian saham adalah Indonesia 41,12% dan Jepang 58,88%.

Program utama PT.Inalum adalah dengan memanfaatkan potensi jatuhnya air danau Toba yaitu dengan membangun dan mengoperasikan PLTA yang terdiri dari pembangkit listrik Siguragura dan Tangga yang berkekuatan sekitar 600 MW, pada masa pembangunannya dikenal dengan nama proyek Asahan.

Sasaran berikutnya adalah membangun pabrik peleburan aluminium dan fasilitas pendukungnya. Pabrik peleburan ini diharapkan dapat memproduksi 225.000 ton aluminium per tahun, lokasinya menghadap selat Malaka di Kuala Tanjung kira-kira 110 km dari kota Medan. Kemudian listrik yang dihasilkan dari PLTA Siguragura dan Tangga disalurkan melalui jaringan transmisi sepanjang 120 km ke Kuala Tanjung, tempat pengolahan / peleburan aluminium.

Dalam operasionalisasinya, dengan mengandalkan kekuatan energi itulah maka alumina sebagai bahan baku utama berikut bahan penolong lainnya diolah/dilebur menjadi Aluminium (murni). Bahan baku yang diperlukan semula dari Jepang dan dalam beberapa tahun terakhir dari Australia.

Sementara itu untuk kelancaran operasional, perusahaan juga mendirikan sebuah pelabuhan dengan 3 dermaganya di Kuala Tanjung, berikut beberapa fasilitas lainnya seperti jalan penghubung, rumah ibadah, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

Dari hasil produksinya, PT.Inalum hanya menghasilkan logam aluminium dalam bentuk ingot (batangan). Berat per batangnya adalah 22,7 kg. Hasilnya sebagian besar di ekspor, terutama ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar / industri di Jepang. Produk yang dihasilkan tersebut umumnya tidak bisa diolah di Indonesia sehingga harus dikirim dulu ke Jepang dan balik lagi ke Indonesia dalam bentuk barang jadi. Dengan demikian ada kewajiban mensupply aluminium ingot ke Jepang, sedangkan sisanya yang kecil di pasarkan di dalam negeri karena kemampuan kita untuk mengolahnya memang kecil.

Selanjutnya karena pihak Jepang menguasai saham mayoritas dan keunggulan lainnya maka pada dasarnya merekalah yang mengendalikan perusahaan berikut target keuntungan yang mereka harapkan. Setelah lebih dari 30 tahun mereka mengendalikan

“ Kehandalan PT.Inalum masih dapat dijamin untuk jangka waktu yang cukup panjang, maka perhatian Pemerintah saat ini hendaknya fokus untuk melakukan revitalisasi atau reorientasi terhadap kegiatan bisnisnya agar manfaatnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Nasional. ”

PT.Inalum, tidak banyak tercatat hal-hal yang menguntungkan untuk negeri kita atau apa yang disebut dengan *win-win solution*, justru dalam pemberitaan lebih sering rugi. Dari segi pemanfaatan energi/ listrik saja misalnya, belum terdengar penduduk sekitar Danau Toba menikmati terangnya malam kecuali dari terang bulan karena energi yang dihasilkan seluruhnya dialokasikan untuk industri pengolahan.

Sebaliknya kita juga melihat inilah hebatnya Pemerintah Jepang dalam memainkan perannya. Praktis mereka tidak punya SDA baik bahan baku maupun energi yang besar, tetapi mereka dapat mengendalikan kegiatan dari hulu sampai hilir. Banyak hal yang menguntungkan mereka dan berimplikasi pada semakin kuatnya eksistensi Jepang sebagai pelaku industri manufaktur dan otomotif terkemuka di Indonesia.

Masa Sekarang

Jauh hari sebelum Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mengambil alih PT.Inalum, banyak investor yang sudah menyatakan diri berminat untuk ambil bagian dalam pengembangan usaha pasca berakhirnya kontrak kerjasama. Pihak Jepang sendiri pun terkesan menunda-nunda kesepakatan karena mereka merasa keberatan untuk melepaskan sahamnya untuk diambil alih, mengingat potensi dan peluang yang tersisa masih demikian besar dan menjanjikan.



Untuk melihat seperti apa potensi dan peluang yang masih ada, tentunya dapat kita lihat dari berbagai kekayaan/aset yang dimiliki, termasuk penunjangnya seperti Teknologi, Sumber Daya Manusia, Bahan Baku, dukungan Pemerintah dan lain sebagainya.

Aset yang dimiliki sudah barang tentu tidak lagi sebaik ketika mulai beroperasi. Bagaimanapun ada unsur penyusutan terhadap aset. Mengenai instalasi pabrik atau peleburan aluminium boleh jadi umur ekonomisnya sudah berakhir meski secara teknis dapat digunakan. Belum lagi seiring dengan perkembangan teknologi terkait dengan efisiensi, apakah teknologi yang telah digunakan selama 30 tahun lebih masih layak dipertahankan atau untuk jangka waktu tertentu harus diganti.

Begitu juga dengan jaminan pasokan energi yang dihasilkan dari PLTA (Sigura-gura dan Tangga) yang berkekuatan sekitar 600 MW, dengan asumsi umur teknis dan ekonomis 50 tahun misalnya, maka pemanfaatannya ke depan tinggal 20 tahun lagi. Demikian juga dengan penilaian terhadap aset lainnya, agar betul-betul dapat dipertanggung-jawabkan.

UNTUK KELANCARAN OPERASIONAL

perusahaan mendirikan sebuah pelabuhan dan dermaganya di Kuala Tanjung

Selanjutnya apabila dari hasil evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa kehandalan PT.Inalum masih dapat dijamin untuk jangka waktu yang cukup panjang, maka perhatian Pemerintah saat ini hendaknya fokus untuk melakukan revitalisasi atau reorientasi terhadap kegiatan bisnisnya agar manfaatnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Nasional.

Katakanlah terkait dengan tekad kita dalam upaya mempersiapkan diri sebagai Negara Industri yang tangguh maka program untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri atau *domestic market obligation* (DMO) pada tahun 2014 dan seterusnya hendaknya menjadi prioritas. Begitu juga dengan pengembangan terhadap produk hilirnya yang cukup beragam. Dalam hal ini termasuk industri aluminium hilir yang belum tersedia di Indonesia tetapi sangat diperlukan, sebagaimana yang disebut dalam buku MP3EI. Untuk hal ini saja bukan pekerjaan yang mudah, karena banyak persoalan yang

bakal dihadapi termasuk yang akan dilaksanakan manajemen baru PT.Inalum. Boleh jadi terkait dengan kontrak jangka panjang yang sulit dirubah, pola kerja perusahaan yang masih dibayang-bayangi dengan tradisi sebelumnya dan lain sebagainya.

Belum lagi Pemerintah berhadapan dengan nasib hasil tambang yang melimpah tetapi sampai sekarang hanya bisa dijual mentah. Pertanyaannya kapan kita bisa memanfaatkan potensi Bauxit yang melimpah di Kalbar yang sudah lama dicanangkan untuk diproses menjadi alumina sebagai bahan baku untuk PT.Inalum yang selama ini diimpor dari Australia.

Sekedar info, sebentar lagi atau dalam tahun 2014 ini akan ada hasil pengolahan Bauxit menjadi Alumina di Kalbar, merupakan buah karya PT.Aneka Tambang dengan mengandeng mitranya dari Jepang. Hanya saja produk yang dihasilkan adalah *Chemical Grade Alumina (CGA)*, dengan tingkat produksi sebesar 300 ribu ton CGA per tahun, sebagian besar untuk tujuan ekspor ke Jepang. Berbeda dengan apa yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu pengolahan Bauxit untuk menjadi *Smelter Grade Alumina (SGA)* dan diteruskan sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan Aluminium. Penggunaan Bauxit untuk CGA dimaksud tidak seberapa besar, begitu juga dengan energi dan nilai tambahnya relatif kecil apabila dibandingkan dengan pengolahan Bauxit untuk tujuan menjadi produk Aluminium. Berikutnya, tidak ada hubungan CGA dengan penguatan industri Nasional atau adanya keterkaitan antara hulu dan hilir, dan manfaatnya pun tidak meluas hanya terasa dalam lingkup regional di Kalbar. Hal ini perlu dikemukakan agar kita bisa membedakan untuk tujuan apa alumina dihasilkan, jangan sampai ketika nanti Kalbar sudah menghasilkan/memproduksi alumina, selalu dihubungkan dengan produk aluminium yang notabene bahan bakunya wajib dari SGA. Begitu juga dengan pemahaman banyak orang mengenai kehadiran industri Alumina yang dihasilkan Kalbar terkait dengan kebijakan MP3EI, ini pun keliru karena pada dasarnya Bauxit yang dinyatakan dalam MP3EI adalah untuk tujuan produk aluminium, dan ketika dimulai tahap pembangunan proyek CGA Kalbar, diresmikan/*ground breaking* oleh Menteri Perindustrian di Tayan pada bulan April 2011 bahkan sebelum MP3EI diluncurkan.

Lebih lanjut keinginan untuk secepatnya mengolah Bauxit menjadi alumina (SGA) di Kalbar juga sudah disuarakan oleh Menteri terkait bidang ekonomi, namun seperti apa gerak majunya, sampai sekarang belum kelihatan.

Sempat ada harapan pada tahun 2011 *Smelter Grade Alumina (SGA)* segera dibangun di Mempawah Kalbar oleh PT Antam dengan

mitra bisnisnya dari Cina, dengan rencana Investasi sebesar US\$ 1 miliar dan produksi 1,2 juta ton SGA per tahun, namun rencana tadi rupanya hanya isapan jempol karena mitra bisnisnya kabur. Sampai sekarang pun perusahaan yang berplat merah ini belum berani untuk melakukan investasi pembangunan *Smelter (SGA)*, dan masih saja sibuk mencari mitra bisnisnya. Berikutnya dari Harita Group dengan mengandeng pihak China telah *ground breaking* oleh Wamen ESDM pada bulan juli 2013 di Ketapang Kalbar, dengan target investasi US\$ 1 miliar dan produksi 2 juta ton SGA per tahun (lebih besar dari PT.Antam), namun sampai sekarang belum ada jaminan pelaksanaannya akan diteruskan. Kemudian ada beberapa lagi perusahaan di Kalbar yang sudah menyatakan diri siap membangun Smelter terkait dengan proposal yang diseleksi kementerian ESDM, inipun kesungguhannya masih sebatas diatas kertas.

Padahal harapan sebelumnya, pasca pengambil alihan PT.Inalum kita dapat memasok Alumina dari negeri sendiri, dalam hal ini dari Kalbar dan dalam perjalanan berikutnya tidak perlu di impor lagi.

Oleh karena itu Pemerintah perlu segera mengambil langkah yang cepat dan tepat, yaitu adanya kebijakan yang menggigit dari hulu ke hilir. Pembangunan sektor pertambangan tidak berdiri sendiri tetapi ditujukan untuk pembangunan industri, dengan demikian perlu disusun road map hilirisasi Bauxit Kalbar. Dalam hal pelaksanaannya kelak Pemerintah tidak hanya sekedar memfasilitasi pihak Swasta saja tetapi dapat juga berperan serta dengan menugaskan BUMN/ BUMD. Bila dipandang perlu, dibuat MOU / kesepakatan antara Gubernur Kalbar dan Sumut sebagai bentuk komitmen atas rencana dan jaminan kelancaran pasokan alumina. Barangkali hal-hal tadi bersifat rekomendasi di tingkat hulu yang perlu diperkuat, untuk kemudian diteruskan dengan kebijakan terhadap pengembangan di hilirnya yang menurut hemat kami jauh lebih kompleks.

Dari cerpen diatas, patut dipertanyakan manfaat apa yang bakal kita dapatkan nantinya seperti diawal cerita pengantar, karena persoalan yang kita hadapi bukanlah hal yang sederhana.

Hal ini perlu dikemukakan karena menurut hemat kami, Pemerintah agaknya kurang persiapan dalam rangka menyambut kembalinya aset yang bernilai strategis dan bersifat vital dan kemudian mempersiapkannya dengan baik untuk masa depan bangsa.



untuk mengolah aluminium di Daerah Asahan Sumut ada batasnya. Meskipun ada wacana untuk meningkatkan kapasitas energi dengan rencana pembangunan PLTA baru, hendaknya tidak menjadi satu-satu harapan dan terkesan dipaksakan, apalagi dalam hubungannya dengan kebijakan MP3EI, Koridor Sumatera tidak dipersiapkan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang.

Disisi lain kita juga melihat pasar aluminium Indonesia meningkat dengan cepat, sementara produksi PT.Inalum hanya bisa memasok sebagian kecil dari yang dibutuhkan industri dalam negeri. Apabila kita tidak mengantisipasi dari sekarang, maka ketergantungan impor akan semakin tinggi dan ujung-ujungnya industri Nasional sulit untuk berkembang.

Oleh karena itu, setelah 40 tahun berlalu harus terbangun wacana untuk melihat alternatif pengembangan baru, tentu saja sesuai dengan potensi yang kita miliki dan potensi lain yang dapat kita manfaatkan. Sejalan dengan pesan MP3EI, terkait dengan komoditi unggulan Daerah, intinya adalah agar sumber daya alam yang dimilikinya dapat diolah.

Potensi dimaksud adalah di Kalbar, yang memiliki sumber bahan baku (tambang Bauxit) dan sumber Energi (Uranium).

Dalam hal potensi Bauxit, sudah disebutkan dalam buku MP3EI sehingga tidak perlu lagi dikemukakan. Sementara untuk mengolah hasil tambang bauxit menjadi produk aluminium memerlukan energi yang besar. Dalam keadaan Kalbar tidak memiliki sumber energi dari air, gas dan batu bara tetapi memiliki potensi Uranium. Secara umum kita ketahui bahwa Uranium adalah sebagai bahan pembuat nuklir dan apabila dipersiapkan untuk pembangunan PLTN menghasilkan energy yang luar biasa besarnya. Maklum dari semua komoditas produk unggulan MP3EI, hanya produk aluminium yang memerlukan energi yang sangat besar dan tentu saja besar pula manfaatnya.

Perlu juga diingatkan bahwa dalam MP3EI, Koridor Ekonomi Kalimantan dengan tema pembangunan; Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional. Terjemahan dari sub tema pembangunan yang pertama, jelas

Masa Yang Akan Datang

Ketika peleburan aluminium akan dibangun atau dirancang sekitar 40 tahun yang lalu, satu-satunya alasan / faktor penentu terwujudnya industri dimaksud adalah potensi hidrolistrik yaitu dengan memanfaatkan potensi jatuhan air danau Toba, sedangkan lainnya bersifat faktor yang mempengaruhi atau merupakan penunjang dan pendukung. Kondisi inilah yang dinilai memberikan keuntungan sampai sekarang, dengan harga energi yang murah meriah.

Dalam perpektif yang lebih maju, kita juga perlu melihat potensi lain yang bisa menjadi peluang. Bagaimanapun sifat ketergantungan

“Aluminium memiliki rantai nilai yang luas dan semakin diminati untuk berbagai keperluan sehingga dikenal dengan logam masa depan”

menghendaki bahwa komoditas Bauxit wajib kita produksi. Kemudian dari sub tema kedua sebagai Lumbung Energi Nasional, juga menghendaki agar sumber energi besar yang kita miliki yaitu Uranium dapat dimanfaatkan untuk PLTN. Selama ini Uranium di Kalbar hanya untuk tujuan penelitian bekerjasama dengan pihak Perancis yang sudah berlangsung sejak tahun 70-an dan hasilnya cukup menjanjikan. Apabila kita dapat memanfaatkan potensi yang kita miliki tersebut, tentunya kita sudah melangkah lebih maju. Dibandingkan dengan sumber energi lainnya seperti batubara, gas dan air, hasil studi menunjukkan bahwa dengan pengoperasian PLTN dapat dihasilkan energi yang luar biasa besarnya dan lebih efisien. Berikutnya ditambah dengan pengalaman kita dalam mengoperasikan PLTN milik BATAN (Reaktor Serba Guna 30 MW) yang dibangun sejak tahun 1987 kiranya dapat memotivasi kita untuk selalu optimis, “kenapa tidak”. Dengan orientasi atau cara pandang seperti itu, kita dapat menyusun Rencana Hilirisasi Bauxit dengan baik yang mengikutsertakan rencana pembangunan PLTN.

Kedepannya menjadi ideal apabila pembangunan industri aluminium terpadu dapat diwujudkan, mulai dari pengolahan Bauxit menjadi Alumina, kemudian dari Alumina menjadi Aluminium sampai dengan mengolahnya menjadi produk akhir di satu lokasi. Apabila skenario ini dapat diwujudkan, Indonesia akan bisa memproduksi Aluminium paling efisien di dunia karena dua komoditi strategis tersebut berada di satu tempat.

Catatan Akhir

Pasca pengambil-alihan PT.Inalum, menurut hemat kami merupakan pelajaran berharga bagi kita untuk menyusun strategi pembangunan Nasional berikutnya, khususnya dalam hal pembangunan di sektor pertambangan dan hubungannya dengan sektor industri.

Kebanggaan terhadap kepemilikan industri Nasional sudah waktunya ditanamkan, sehingga potensi yang kita miliki tidak mudah diobral atau diolah negara lain, karena kita memiliki kemampuan untuk itu. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan secara konsekuen UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Walaupun sekarang banyak tantangannya karena para investor memang belum begitu siap dalam pembangunan smelter tetapi dalam pelaksanaannya kita perlu belajar konsisten dan menerima konsekuensinya. Katakanlah akan terjadi defisit karena penerimaan Negara akan berkurang, PHK, dsb yang berakibat pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dibayangi pelambatan selama pembangunan smelter untuk beberapa tahun, namun hasilnya dikemudian hari jauh lebih menguntungkan. Agaknya UU No.4 tadi pun perlu di back up dengan ketentuan lain, agar hasil tambang yang sudah diolah nantinya tidak melulu untuk tujuan ekspor tetapi lebih diprioritaskan untuk kepentingan industri dalam negeri.

Perlu juga disosialisasikan bahwa produk aluminium memiliki rantai nilai yang luas dan semakin diminati untuk berbagai keperluan sehingga dikenal dengan logam masa depan. Dengan adanya kepedulian terhadap jenis industri ini saja maka akan sangat besar artinya bagi pembangunan dan perbaikan terhadap struktur industri Nasional, apalagi kalau dikembangkan pada komoditas atau jenis industri lainnya.

Lebih lanjut, disisi lain kita pun patut bersyukur karena PT.Inalum bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi, adalah merupakan jasa Tim Perunding yang dipimpin oleh A.R.Soehoed ketika *Master Agreement* disusun. Kita tidak saja mewarisi apa yang sudah ada tetapi yang lebih penting bagaimana membuatnya menjadi lebih bermanfaat. Pada gilirannya lah para pembuat kebijakan sekarang lebih berinovasi dalam mengembangkan ekonomi Nasional.

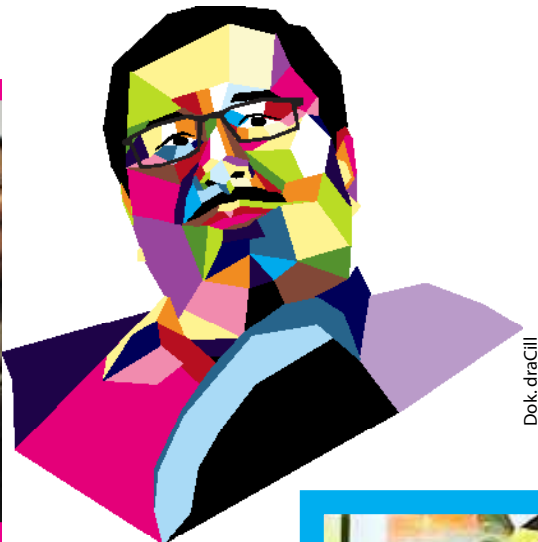
Selingan



WPAP dibalik SIMPUL Vol.21

Jika Amerika punya maestro *Pop Art* bernama Andy Warhol maka Indonesia bisa berbangga punya Wedha Abdul Rasyid yang menciptakan aliran WPAP (*Wedha Pop Art Potrait*) atau FMB (Foto Marak Berkotak), atas jasanya ini ia dijuluki bapak ilustrasi Indonesia. Ia juga dikenal sebagai ilustrator cerpen Lupus karya Hilman sebuah cerpen yang ditulis untuk majalah Hai di tahun 1986.

Pada tahun 1990, dikarenakan penurunan daya penglihatan karena usia yang telah mencapai 40 tahun sehingga ia sulit menggambar wajah dalam bentuk yang realistis dan detail. Wedha kemudian mencoba ilustrasi bergaya kubisme untuk gambarnya. Gaya ini kemudian tumbuh dan semakin populer sebagai bagian dari gaya popart bahkan hingga dengan saat ini. Gaya ilustrasi ini disebut *Wedha's Pop Art Potrait* (WPAP), bahkan ada yang menyebutnya sebagai aliran *Wedhaism*. Lihat



Dok. draCIII



WPAP (Wedha Pop Art Potrait) merupakan aliran yang diciptakan oleh maestro pop art Indonesia Wedha Abdul Rasyid

Referensi: http://id.wikipedia.org/wiki/Wedha_Abdul_Rasyid
<http://www.squidoo.com/wedha-pop-art-portrait-wpap>

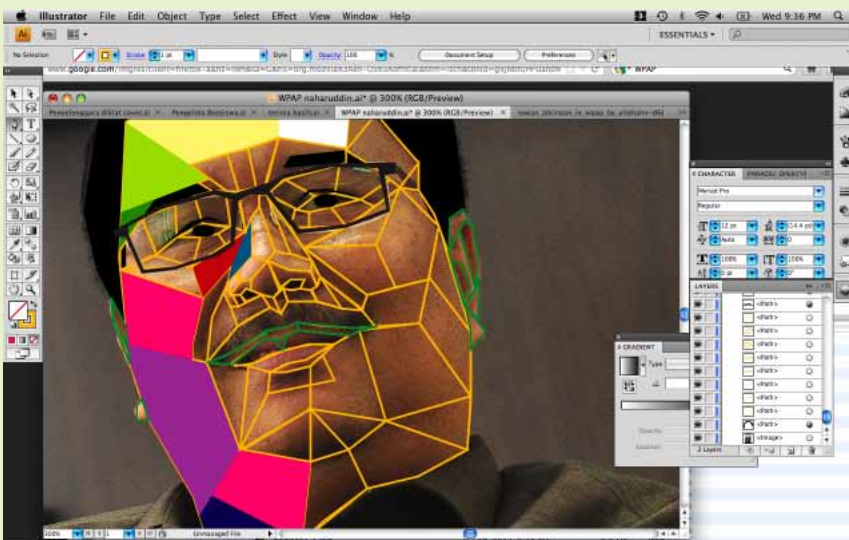
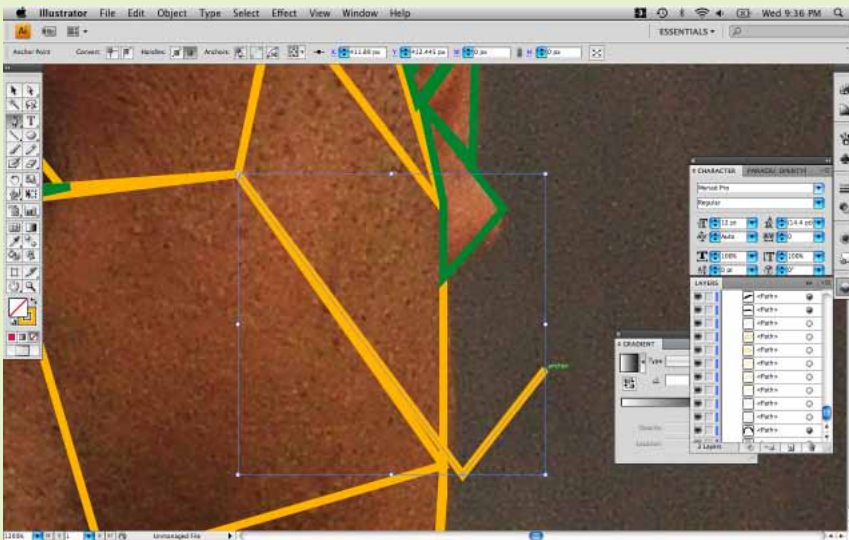
karya-karya Wedha. Bentuk dan tekniknya khas, ia gambarkan wajah para tokoh itu disusun dalam mosaik warna yang dipecah menurut faset-fasetnya. Bukan dalam pengertian kubisme, tapi lebih menggabungkan ragam warna yang harmonis sehingga membentuk tokoh yang digambarkan. Meski karyanya tidak detail, namun mampu mewakili karakter wajah dengan sangat baik.

Anda akan dapat mengenali wajah-wajah mendunia, seperti Mick Jagger, Jimmy Hendrix, Jim Morrison, The Beatles, Elvis Presley, Sting, Bono, Queen, sampai tokoh politikus sebut saja JFK, Bung

Karno, Indra Gandhi, Benazir Buttho, Fidel Castro, Ahmadinejad. Juga potret Rendra, Slank, Jakob Oetama, John Lennon sampai Andy Warhol.

Pada Simpul Volume 21 ini, kami mencoba bernostalgia menggunakan teknik WPAP dengan merubah potrait beberapa wajah narasumber. Dimulai dengan teknik *tracing*, yaitu menjadikan sebuah *image* menjadi vektor. Jika dahulu Wedha menggunakan bantuan kertas kalkir, maka saat ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan bantuan program komputer yaitu Illustrator. Sekalipun menggunakan bantuan komputer proses *tracing* tetap dilakukan secara manual dengan membuat garis-garis sehingga membentuk *loop* tertutup yang nantinya akan di beri warna. Pewarnaan sangat memperhatikan kontras maupun komplimen warna dalam grafis.

Selingan



TRACING

menggunakan Illustrator, walaupun dengan bantuan komputer tetapi prosesnya tetap dilakukan secara manual menggunakan pen tool garis demi garis.

Penggabungan komposisi warna dan garislah yang pada akhirnya membentuk sebuah *potrait*. Pada dasarnya saat pewarnaan akan memperhatikan 3 hal yaitu: *highlight*, *midtone* dan *shadow*. *Highlight* adalah bagian yang paling terang dari suatu objek, bisa juga di terjemahkan bagian yang memiliki kurva tertinggi saat terkena cahaya, *shadow* adalah kebalikan dari *highlight* sedangkan *midtones* merupakan daerah diantara keduanya.

Bagian yang mendapat porsi *Highlight* biasanya adalah hidung, pipi, kening dan dagu. Pada bagian inilah sebaiknya diberi warna paling terang diantara warna lainnya (mendekati putih). *Shadow*, adalah bayangan biasanya di bagian leher, di bagian bawah hidung. Karena sifatnya bayangan maka harus diberi warna yang cenderung lebih gelap dari warna lainnya. Pada bagian yang berdampingan sebaiknya menggunakan komplanen warna, adalah dua warna yang saling berseberangan (memiliki sudut 180°) di lingkaran warna. Dua warna dengan posisi kontras komplementer menghasilkan hubungan kontras paling kuat. Misalnya jingga dengan biru, merah dengan hijau.

[SIMPUL]



Kapusbindiklatren Bappenas memberi pengarahannya dalam acara *info session* universitas-universitas dari Inggris



Kapusbindiklatren Bappenas dalam kegiatan Team Bonding Tim SPIRIT

Pusbindiklatren Bappenas



Kapusbindiklatren Bappenas dalam acara Syukuran kantor baru Pusbindiklatren Bappenas



Kantor baru Pusbindiklatren Bappenas
Jl. Proklamasi No.70 Jakarta 10320



**Informasi
Pelaksanaan Diklat
Non Gelar Substantif
Tahun Anggaran 2014**

TELAH DIBUKA PENDAFTARAN

Diklat Non Gelar Substantif
Tahun Anggaran 2014
yang terdiri dari:

Diklat PPD-Reguler (30 hari)
Diklat PPD-RPJMD (14 hari)
Diklat Green Economy (14 hari)
Diklat Public Private Partnership (14 hari)
Diklat Mitigasi Bencana Alam (14 hari)
Diklat Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) 14 hari
Diklat Kelayakan Proyek (14 hari)
Diklat Local Economic Resources Development (LERD) 14 hari

Diklat akan dilaksanakan
oleh Program Studi
Pelaksana diklat
Non Gelar yang sesuai
dengan bidangnya:

LPEM-UI, LEMTEK-UI, MAP-UGM, MPKD-UGM
GEO-INFO-UGM, MIL-UNDIP, MIL-UNPAD
LP3E-UNPAD, MPWK-ITB, PPS-UNSRI
PPS-UNSYIAH, FE-UNSYIAH, RCCP-UB
FE-UTM, P3KM-UNHAS, MPWK-UNDIP



Informasi:

Pusbindiklatren Bappenas

Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta 10320

T: 021- 31928279, 31928280, 31928285

F: 021-31928281

Website: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Email: pusbindiklatren@bappenas.go.id